

20
23



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

KOTA TANGERANG SELATAN



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama Tahun 2023 atau Tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Pada tahun ini telah dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PANRB. Dalam PK 2023 terdapat beberapa perubahan target dengan *tahapan* RPJMD yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan beban kerja akibat meningkatnya kinerja Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan, serta strategi Tahun 2022.

LKjIP Kota Tangerang Selatan tahun 2023 juga disajikan dalam website <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id> Selanjutnya dalam laporan ini telah kami jelaskan latar belakang, isu strategis, perencanaan serta pencapaian dan pengukuran kinerja tahunan Pemerintah Kota. Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan, akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Tangerang Selatan, Maret 2024

Wali Kota Tangerang Selatan


BENYAMIN DAVNIE

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki 5 (lima) indikator kinerja utama tujuan untuk mewujudkan misi dan terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan tujuan.

Target yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintahan dan pengguna layanan di Kota Tangerang Selatan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**, karena rata-rata capaiannya **110,68%** dari target. Capaian tersebut turut didukung oleh program prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2023 dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kinerja hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahunan RPJMD 2021-2026 serta **menetapkan target yang disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023**.

Dari penggunaan anggaran, realisasi anggaran mencapai **96,00%**, dan rata-rata capaian kinerja Sasaran/*Outcome* adalah sebesar **110,68%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah juga sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kondisi Kota Tangerang Selatan	4
1.3.1. Letak Wilayah Geografis	4
1.3.2. Luas Wilayah	4
1.3.3. Topografi	5
1.3.4. Karakteristik Wilayah	5
1.3.5. Aspek Kependudukan	6
1.4. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	9
1.4.1. Kedudukan	9
1.4.2. Kewenangan dan Tugas Pokok	9
1.4.3. Struktur Organisasi	11
1.4.4. Aparatur Pemerintah	13
1.5. Isu Strategis	18
1.6. Sistematika Laporan	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan	26
3.2. Analisis Capaian Kinerja	32
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98
3.4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	102
3.5. Realisasi Anggaran	106
BAB IV PENUTUP	111

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan 2022-2023	8
Tabel 1.4.	Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan	9
Tabel 1.5.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Jabatan Tahun 2023.....	15
Tabel 1.6.	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	16
Tabel 1.7.	Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	16
Tabel 1.8.	Isu Strategis Kota Tangerang Selatan	18
Tabel 2.1.	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	22
Tabel 2.2.	Alokasi Anggaran Target Kinerja Daerah Tahun 2023	24
Tabel 3.1.	Kategori Rentang Capaian	27
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	30
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan Tahun 2023.....	37
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2023.....	40
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Meningkatnya kesejahteraan keluarga Tahun 2023	45
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Meningkatkan daya saing pemuda Tahun 2023	46
Tabel 3.9.	Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023	47
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender Tahun 2023	49
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi Tahun 2023.....	51
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan Tahun 2023	53

Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan Tahun 2023.....	56
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan Tahun 2023.....	58
Tabel 3.15.	Capaian Kinerja Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan Tahun 2023.....	67
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam Tahun 2023.....	70
Tabel 3.17.	Capaian Kinerja Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah Tahun 2023	72
Tabel 3.18.	Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	72
Tabel 3.19.	Capaian Kinerja Meningkatnya sektor ekonomi kreatif Tahun 2023	74
Tabel 3.20.	Capaian Kinerja Meningkatnya Investasi Tahun 2023	76
Tabel 3.21.	Capaian Kinerja Meningkatnya produktifitas tenaga kerja Tahun 2023	78
Tabel 3.22.	Capaian Kinerja Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien Tahun 2023.....	81
Tabel 3.23.	Komponen Capaian Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	81
Tabel 3.24.	Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023	83
Tabel 3.25.	Nilai Indeks Persepsi Korupsi	87
Tabel 3.26.	Unsur Prioritas Perbaikan Dan Rencana Tindak Lanjut SKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	89
Tabel 3.28.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	99
Tabel 3.29.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023	106

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Jumlah Hari Hujan Kota Tangerang Selatan	5
Gambar 1.2.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	7
Gambar 1.3.	Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	7
Gambar 1.4.	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan	12
Gambar 1.5.	Jumlah Pegawai Kota Tangerang Selatan Menurut Gender Tahun 2023.....	13
Gambar 1.6.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Golongan Ruang Tahun 2023	14
Gambar 1.7.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Pendidikan Tahun 2023.....	14
Gambar 3.1.	Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 s.d 2023	33
Gambar 3.2.	Perkembangan Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.....	38
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi AHH Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2023	41
Gambar 3.4.	Perkembangan Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	47
Gambar 3.5.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023	50
Gambar 3.6.	Tren Nilai Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.....	52
Gambar 3.7.	Tren Kinerja Rasio konektivitas Kota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.....	54
Gambar 3.8.	Tren Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.....	54
Gambar 3.9.	Tren Kinerja Indeks kota layak huni (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023	56
Gambar 3.10.	Tren Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.....	59
Gambar 3.11.	Tren Kinerja Persentase permukiman layak huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	61

Gambar 3.12.	Tren Kinerja cakupan pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	63
Gambar 3.13.	Tren Kinerja Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	66
Gambar 3.12.	Tren Kinerja Indeks Rasa Aman di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.....	68
Gambar 3.12.	Tren Kinerja Indeks Demokrasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.....	69
Gambar 3.9.	Tren Kinerja Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2023.....	70
Gambar 3.17.	Tren Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	73
Gambar 3.17.	Tren Kinerja Nilai sektor ekonomi kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	74
Gambar 3.17.	Tren Kinerja Nilai sektor ekonomi kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	76
Gambar 3.20.	Tren Kinerja Produktivitas tenaga kerja per total output Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.....	79
Gambar 3.21.	Tren Kinerja Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023	80
Gambar 3.22.	Tren Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023	82
Gambar 3.23.	Tren Kinerja Nilai AKIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023	84
Gambar 3.24.	Tren Kinerja Nilai IPK Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023	87
Gambar 3.25.	Tren Kinerja IKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Wali Kota untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Tangerang Selatan, maka penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian, LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu Wali Kota Tangerang Selatan kepada Presiden melalui Kementerian PAN-RB yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2023, yaitu tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- e. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
- f. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
- h. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 73);
- i. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 121);
- j. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 4).
- k. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 7).
- l. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 14).

- m. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 20);
- n. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);
- o. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 14). Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Kondisi Kota Tangerang Selatan

1.3.1. Letak Wilayah Geografis

Kota Tangerang Selatan secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'00" Lintang Selatan. Letak Kota Tangerang Selatan sangat strategis karena menghubungkan antara DKI Jakarta, serta Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, sehingga setiap pertumbuhan Kota Tangerang Selatan akan berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya.



Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019, diolah, 2024

Kota Tangerang Selatan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

1.3.2. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 bahwa luas wilayah Kota Tangerang Selatan seluas 164,85 Km². Apabila dilihat dari kecamatan terluas adalah Kecamatan Pondok Aren menempati posisi dengan luas wilayah terbesar yaitu 29,8 Km² sebesar 18,08% dari luas kota, sedangkan Kecamatan Setu menempati posisi dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 16,76 Km², sekitar 10,17% dari luas kota. Keterangan luas lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1.	Setu	16,76	10,17%
2.	Serpong	28,27	17,15%

3.	Pamulang	28,74	17,43%
4.	Ciputat	21,11	12,81%
5.	Ciputat Timur	17,82	10,81%
6.	Pondok Aren	29,8	18,08%
7.	Serpong Utara	22,36	13,56%
Jumlah		164,85	100,00%

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019

1.3.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3%, dengan ketinggian wilayah antara 14.80 – 29.88 mdpl. Secara garis besar kemiringan terbagi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kemiringan antara 0-3% meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
2. Kemiringan antara 3-8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

Keadaan iklim didasarkan pada info dari Stasiun Pos Pengamatan Balai Besar Wilayah II Ciputat pada Koordinat 06° 18' 15.2"LS-106° 45' 38.2"BT dan elevasi 41 meter, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara, intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berada disekitar 27,70°C dengan temperatur udara minimum sebesar 24.30°C dan temperatur udara maksimum sebesar 32,2°C.

Rata-rata kelembaban udara adalah 79,40%, keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 390,70 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 236,00 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Februari, dengan hari hujan sebanyak 24 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 8,3 m/detik, dan kecepatan maksimum rata-rata 11 m/detik.

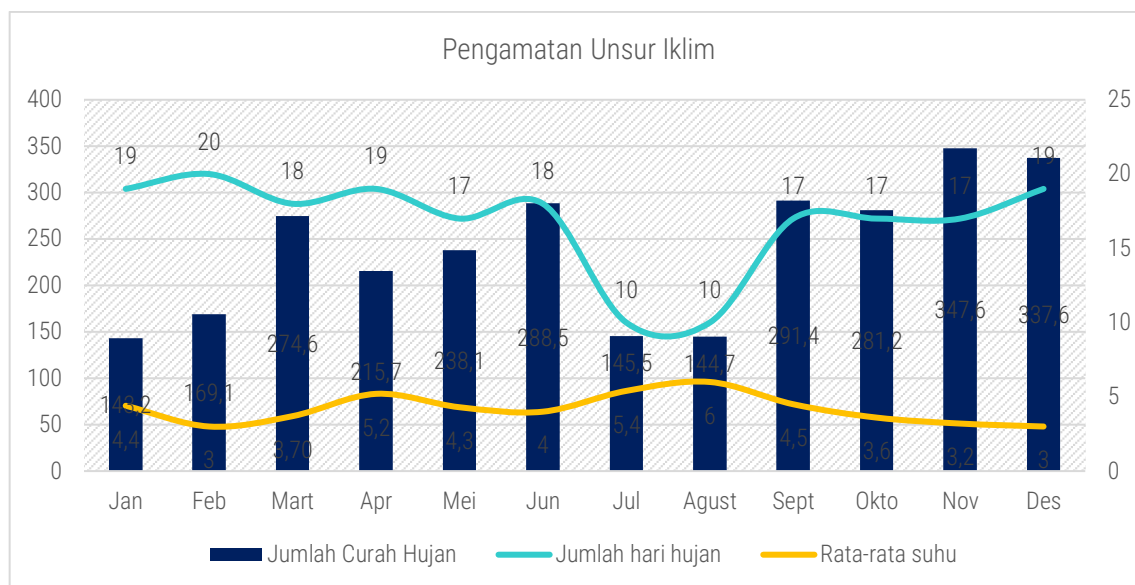
1.3.4. Karakteristik Wilayah

Keadaan geologis Kota Tangerang Selatan dibentuk oleh dua formasi batuan, yaitu: (i) Batuan Alluvium (Qa) yang terdiri dari aluvial sungai dan rawa yang berbentuk pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan. Jenis tanah ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian. dan (ii) Batuan Gunung Api yang berupa material lepas yang terdiri dari lava andesit, dasit, breksi- tuf dan tuf. Secara fisik Lava Andesit berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjukkan struktur aliran, dan Breksi-Tuf dan Tuf pada umumnya telah lapuk, mengandung komponen Andesit dan Desit. Pada umumnya tanah jenis ini digunakan sebagai kebun campuran, perumahan dan tegalan.

Suhu udara rata-rata di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 adalah 28,01°C, dengan suhu tertinggi terjadi di bulan Agustus yaitu 30,1°C dan suhu terendah terjadi di bulan Desember 2023 yaitu 28,3°C. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2023 sekitar 79,48%.

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yaitu 347,6 mm³, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 239,77 mm³. Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 20 hari. Data jumlah hari hujan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1. Jumlah Hari Hujan Kota Tangerang Selatan



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

1.3.5. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki penduduk yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 1.414.619 jiwa di 7 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin meliputi 709.388 jiwa atau 50,15% penduduk perempuan dan 705.231 jiwa atau 49,85% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pamulang yaitu 326.296 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Setu yaitu 92.659 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2023

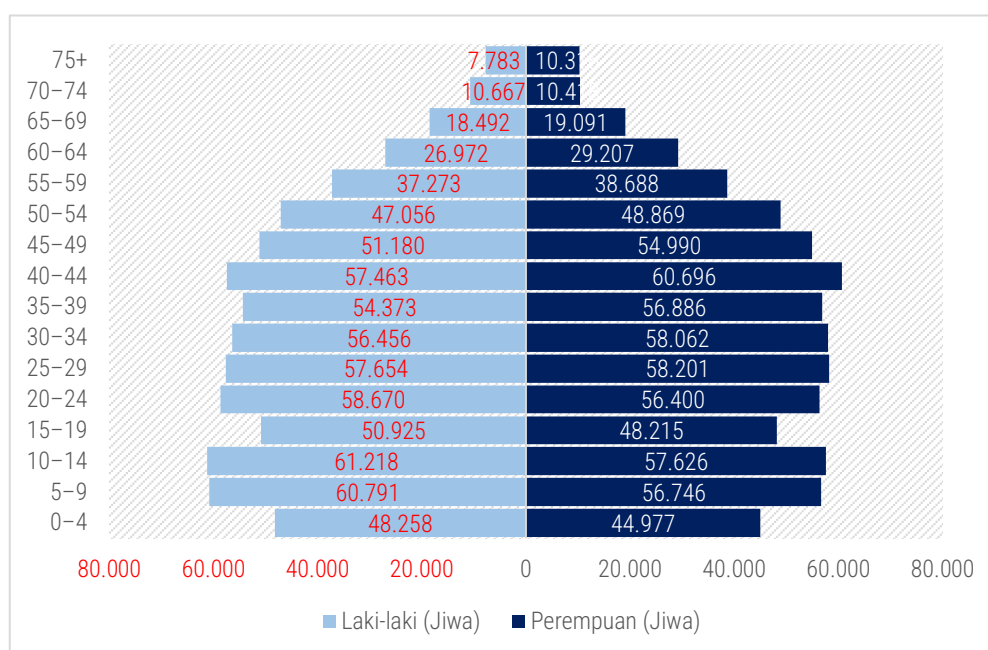
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Serpong	81.933	83.067	165.000
2	Serpong Utara	69.374	69.841	139.215
3	Pondok Aren	148.273	149.127	297.400
4	Ciputat	112.049	111.999	224.048
5	Ciputat Timur	84.336	85.665	170.001
6	Pamulang	162.707	163.589	326.296
7	Setu	46.559	46.100	92.659
	Jumlah Penduduk	705.231	709.388	1.414.619

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2024

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 1.008.236 jiwa atau 71,27%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 329.616 jiwa atau 23,30% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 76.767 jiwa atau 5,43%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Tangerang Selatan memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1.2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

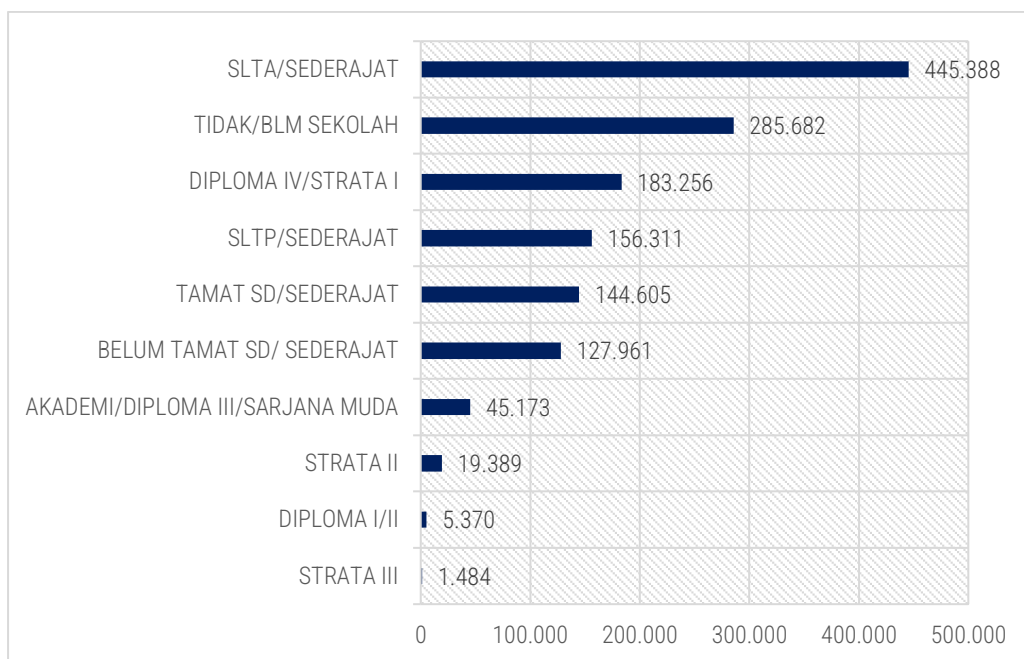


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Secara umum penduduk Kota Tangerang Selatan didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 445.388 orang dan yang paling sedikit adalah Strata III sebanyak 1.484 orang. Jika dilihat lebih lanjut, bahwa kategori tingkat Pendidikan Tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi oleh Diploma IV/Strata I sebanyak 183.256 orang. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh SLTA/ sederajat sebanyak 445.388 orang. Namun masih adanya kelompok penduduk yang tidak/ belum sekolah sebanyak 285.682 orang. Berikut komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 1.3. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2024

d. Pertumbuhan Penduduk

Pergerakan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data konsolidasi bersih Semester II tahun 2023. Jumlah penduduk Tahun 2023 sebanyak 1.414.619 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 sebesar 1,48%. Gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk
		2022	2023	
1	Serpong	161.356	165.000	2,26%
2	Serpong Utara	137.462	139.215	1,28%
3	Pondok Aren	293.968	297.400	1,17%
4	Ciputat	220.125	224.048	1,78%
5	Ciputat Timur	169.133	170.001	0,51%
6	Pamulang	321.764	326.296	1,41%
7	Setu	90.207	92.659	2,72%
Jumlah		1.394.015	1.414.619	1,48%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2024

1.4. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

1.4.1. Kedudukan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 26 November tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Pembentukan daerah otonom baru tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan berada di Jl. Maruga Raya No. 1 Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan sebagian kantor pemerintahan terpusat di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) dan sebagian lainnya berada di luar kawasan pusat pemerintahan, diantaranya: Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Bapenda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup serta DPRD.

1.4.2. Kewenangan dan Tugas Pokok

Sebagai daerah otonom, kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi.

Rincian urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan sebanyak 30 (tiga puluh) urusan sedangkan pelaksana urusan perangkat daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara rinci pelaksanaan urusan oleh perangkat daerah diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4. Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Badan penanggulangan Bencana Daerah
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		6	Sosial	Dinas Sosial

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		10	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		14	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		16	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		17	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
		2	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
		3	Pariwisata	Dinas Pariwisata
		4	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
V	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
VII	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	Pengawasan	Inspektorat Daerah
VIII	Unsur Kewilayahan	1	Kecamatan	Pamulang
				Ciputat
				Setu
				Serpong
				Pondok Aren
				Serpong Utara
IX	Unsur Pemerintahan	1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Ciputat Timur
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

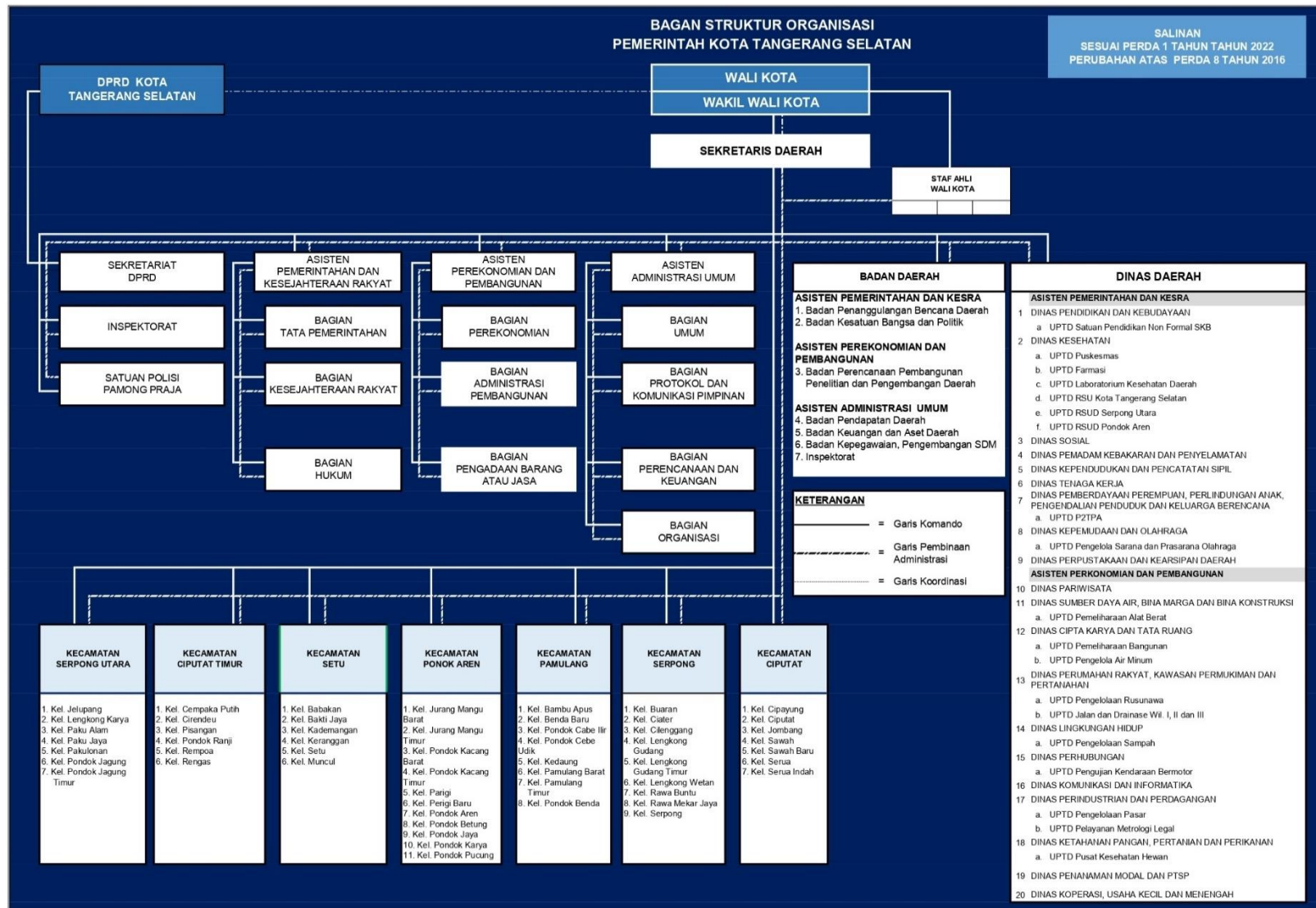
No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
	Umum			

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016

1.4.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berikut ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan:

Gambar 1.4. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan



1.4.4. Aparatur Pemerintah

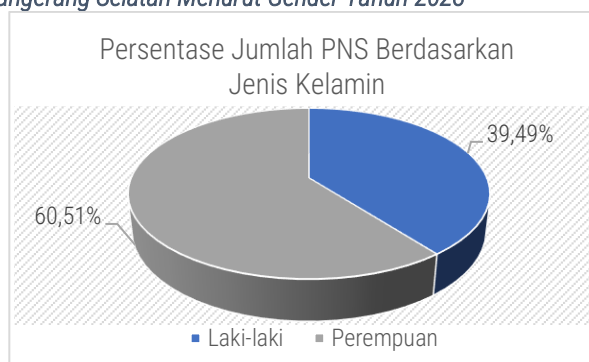
Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan pegawai yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebanyak 1803 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat Pendidikan.

a. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional. Pada tahun 2023, dari 4.447 PNS, sebanyak 61% atau 2.691 orang berjenis kelamin perempuan dan 39% atau sebanyak 1.756 orang berjenis kelamin laki-laki. Secara lebih rinci kondisi tersebut diuraikan pada tabel dan Gambar berikut.

Gambar 1.5. Jumlah Pegawai Kota Tangerang Selatan Menurut Gender Tahun 2023

Gender	Jumlah
Laki-laki	1.756
Perempuan	2.691
Total	4.447



Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2024

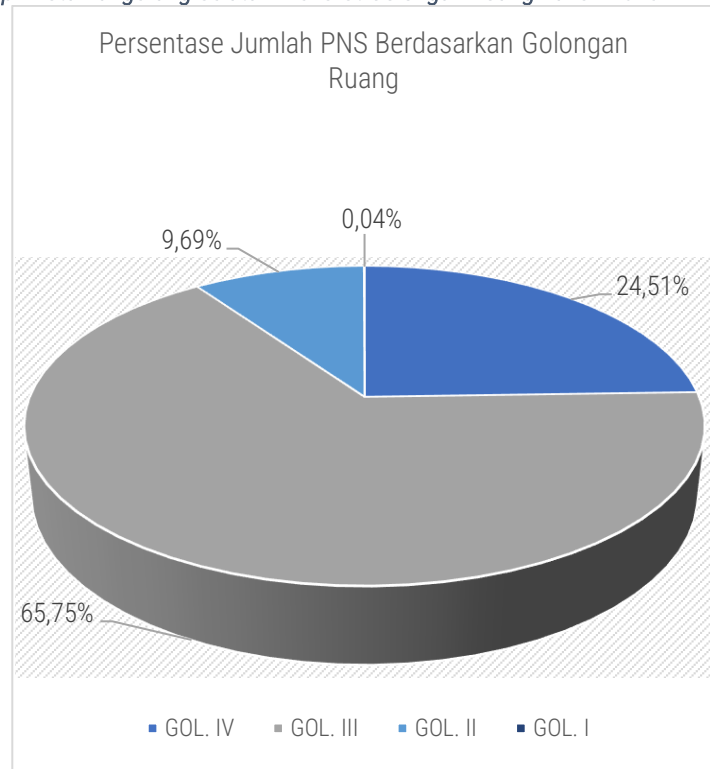
Berdasarkan tabel dan gambar diatas, komposisi pegawai berjenis kelamin perempuan yang lebih besar daripada laki-laki. Dengan demikian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama.

b. Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III sebanyak 2.924 orang atau 65,75% dan paling sedikit pada golongan I sebanyak 2 orang atau 0,04% sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel dan Gambar dibawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Tangerang Selatan.

Gambar 1.6. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Golongan Ruang Tahun 2023

Gol/Ruang	Jumlah
IV/e	0
IV/d	1
IV/c	44
IV/b	392
IV/a	653
III/d	943
III/c	662
III/b	866
III/a	453
II/d	114
II/c	227
II/b	46
II/a	44
I/d	2
I/c	0
I/b	0
I/a	0
Total	4.447



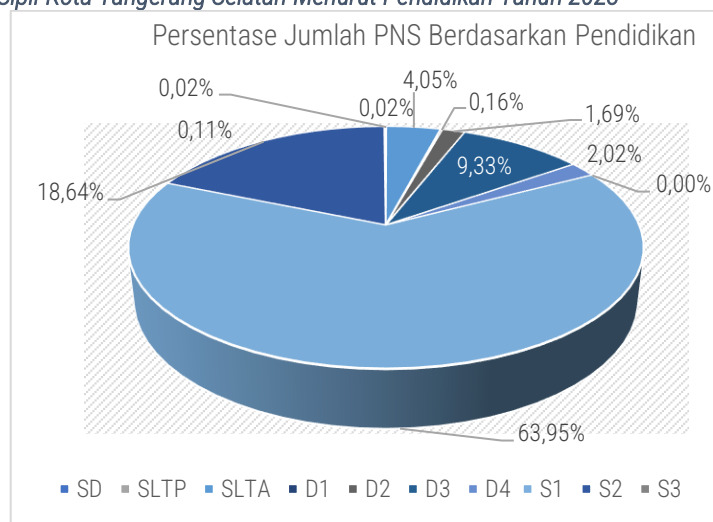
Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2024

c. Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana Gambar berikut.

Gambar 1.7. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Pendidikan Tahun 2023

Pendidikan	Jumlah
SD	1
SLTP	1
SLTA	180
D1	7
D2	75
D3	415
D4	90
S1	2.844
S2	829
S3	5
Total	4.447



Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 1.7, sebagian besar tingkat pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 63,95% (2.844 orang) dan PNS berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 18,64% (829 orang). Dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang PNS telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Doktoral (S3). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

d. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Kondisi PNS di lingkungan Kota Tangerang Selatan menurut jabatan didominasi oleh jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.777 orang, sedangkan jabatan struktural (eselon dan fungsional umum) sebanyak 1.670 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.5. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Jabatan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	ESELON												FUNGSIONAL TERTEKUTU		FUNGSIONAL UMUM		JUMLAH
		II.A		II.B		III.A		III.B		IV.A		IV.B						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV/a			1		15	6	51	27	22	22	2	13	183	289	10	12	653
2	IV/b			11	2	23	9				1		1	91	253	1		392
3	IV/c	1		18										11	14			44
4	IV/d													1				1
	GOL. IV	1		30	2	38	15	51	27	22	23	2	14	286	556	11	12	1.090
1	III/a									1		8	2	76	170	87	109	453
2	III/b									19	1	35	23	143	392	101	152	866
3	III/c							3		49	12	41	43	118	286	45	65	662
4	III/d					2		25	6	81	34	58	58	203	367	41	68	943
	GOL. III					2		28	6	150	47	142	126	540	1.215	274	394	2.924
1	II/a													1		29	14	44
2	II/b													3		18	25	46
3	II/c													15	96	64	52	227
4	II/d													8	57	39	10	114
	GOL. II													27	153	150	101	431
1	I/a																	
2	I/b																	
3	I/c																	
4	I/d															2		2
	GOL. I															2		2
	TOTAL	1		32		55		112		242		284		2.777		944		4.447

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

e. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebanyak 3.327 orang. Jumlah PPPK terbanyak berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 2.189 orang, sedangkan yang paling sedikit tersebar di 3 dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebanyak 1 orang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 1 orang, dan Dinas Sosial dengan jumlah 1 orang. Selengkapnya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Nama Unit Kerja	PPPK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	595	1.594	2.189
2	Dinas Kesehatan	253	876	1.129
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1	1
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4		4
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		1	1
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan		2	2
7	Dinas Sosial	1		1
TOTAL		853	2.474	3.327

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

f. Jumlah Non ASN

Jumlah Pegawai Non ASN di Pemerintah Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 10.293 orang yang didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebanyak 7.431 orang sedangkan pegawai perempuan berjumlah 2.862 orang. Selengkapnya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 1.7. Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	18	43
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	15	51
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	49	19	68
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62	7	69
5	Badan Pendapatan Daerah	86	22	108
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	35	16	51
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	97	38	135
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150	61	211
9	Dinas Kesehatan	933	767	1.700
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	58	20	78
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	79	33	112

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41	26	67
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.084	131	1.215
14	Dinas Pariwisata	59	19	78
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	242	10	252
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	47	89	136
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	182	49	231
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82	34	116
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.297	723	2.020
20	Dinas Perhubungan	418	56	474
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	132	28	160
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	60	26	86
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	233	50	283
24	Dinas Sosial	60	33	93
25	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	115	36	151
26	Dinas Tenaga Kerja	43	22	65
27	Inspektorat	20	11	31
28	Kecamatan Ciputat	113	35	148
29	Kecamatan Ciputat Timur	126	30	156
30	Kecamatan Pamulang	134	44	178
31	Kecamatan Pondok Aren	185	56	241
32	Kecamatan Serpong	146	41	187
33	Kecamatan Serpong Utara	122	32	154
34	Kecamatan Setu	126	38	164
35	Satuan Polisi Pamong Praja	340	43	383
36	Sekretariat Daerah	237	95	332
37	Sekretariat DPRD	177	89	266
Jumlah		7.431	2.862	10.293

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

1.5. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.8. Isu Strategis Kota Tangerang Selatan

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
1. Kualitas SDM belum berdaya saing	1. Daya Saing SDM
2. Belum optimalnya layanan infrastruktur transportasi	2. Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari
3. Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni	
4. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.	3. Daya saing ekonomi terutama Sektor Ekonomi Kreatif
5. Belum optimalnya perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien	4. Birokrasi Efektif dan Efisien

Sumber: Bappelitbang Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Adapun masing-masing isu strategis Kota Tangerang Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Daya Saing SDM

Aspek pendidikan

Penduduk usia >15 tahun di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh penduduk dengan tingkat Pendidikan SMA/ sederajat sebesar 47,25%. Sementara itu penduduk dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebanyak 25,91%. Partisipasi sekolah jenjang SMA/ sederajat tahun 2023 sebesar 77,59%, sementara partisipasi sekolah jenjang SD dan SMP masing-masing sebesar 99,63% dan 98,59%, sehingga perlunya upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, begitupun dengan akselerasi angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun perlu terus didorong agar supaya capaiannya menjadi 100%, dan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah usia 15-18 tahun perlu terus dilakukan kolaborasi bersama Provinsi Banten agar mencapai lebih dari 90%.

Aspek kesehatan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau juga dinilai belum merata, hal ini di tandai dengan masih terdapat anak dan ibu yang mengalami permasalahan gizi makro dan mikro, seperti stunting, obesitas sentral dan gizi buruk. Pada tahun 2023, tercatat prevalensi stunting balita sebesar 9, prevalensi kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 3,12, prevalensi obesitas sentral sebesar 44,8 dan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,06. Disamping itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2023 sebesar 94,27% menunjukkan masih perlunya optimalisasi sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif, terutama respon terhadap kedaruratan kesehatan.

Aspek perlindungan sosial

Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 2,57%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,50%. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebanyak 46,31 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 44,29 ribu jiwa.

Dalam lingkup pelayanan perlindungan sosial, belum digunakannya satu data sasaran yang valid dan terintegrasi menyebabkan upaya perlindungan sosial terfragmentasi dan berpotensi terjadi kesalahan sasaran. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan sosial belum adaptif sesuai kerentanan dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan-perubahan, termasuk perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Maka dari itu diperlukan optimalisasi kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Tangerang Selatan, dari aspek pendidikan memiliki kualitas yang belum merata, aspek kesehatan masih belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, dan aspek perlindungan sosial masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

2. Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari

Konektivitas infrastruktur masih menjadi isu strategis dalam rencana kerja tahunan pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, hal ini disebabkan Kota Tangerang Selatan memiliki infrastruktur dan layanan perkotaan yang cukup lengkap, terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan SDA, dan infrastruktur perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem drainase, fasilitas pejalan kaki, fasilitas pesepeda, fasilitas perpustakaan, tempat evakuasi bencana, fasilitas pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Permasalahan yang dihadapi terkait infrastruktur dan layanan perkotaan tersebut adalah seluruh infrastruktur tersebut belum terintegrasi dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat. Belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas perpustakaan dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya 36 titik kemacetan pada tahun 2023. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir di beberapa wilayah. Belum terintegrasinya sistem evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti sistem jaringan jalan, menyebabkan ketahanan daerah terhadap bencana rendah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang ramah dapat diakses oleh kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, wanita dan anak-anak, masih menjadi permasalahan yang dirasakan di Kota Tangerang Selatan.

3. Daya saing ekonomi terutama Sektor Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro di Kota Tangerang Selatan masih relatif kecil hanya sebesar 0,29%. Selain itu, jumlah UMKM yang bergerak dalam bidang usaha kreatif masih sedikit yaitu sebesar 12,93%. Hal tersebut dapat menggambarkan belum optimalnya kontribusi UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan rantai ekonomi nasional. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil. Hal-hal tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi di sektor Ekonomi Kreatif masih perlu ditingkatkan.

4. Birokrasi Efektif dan Efisien

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pada tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih berkategori B (67,33). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan sebesar 89,87% (<90%). Sementara itu nilai reformasi birokrasi tahun 2023 baru sebesar 76,79, dan indeks persepsi korupsi di Kota Tangerang Selatan masih diangka 74,29. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan kualitas kinerja, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan, terutama dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Daerah.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Kinerja Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikator Kinerja Utama, Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui Kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan adalah:

“Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”

Makna dalam Visi tersebut adalah:

1. **Tangsel Unggul** menunjukkan yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.
2. **Menuju Kota Lestari** bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dari 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan pula dalam RPJMN.
3. **Saling Terkoneksi** bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah.
4. **Efektif dan efisien** adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

Seiring dengan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang terus berjalan, maka upaya perwujudan Visi diatas, akan dicapai melalui 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul;
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi;
3. Membangun Kota yang Lestari;
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif;
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, telah menuangkan target kinerja daerah yang ditetapkan pada Tahun 2023 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Tangerang Selatan. PK Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalami perubahan target dari *milestone* RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi menyesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, akibat meningkatnya kinerja Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan, serta strategi yang diambil pada tahun 2022.

Berikut merupakan PK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebelum dan setelah perubahan.

Tabel 2.1. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Awal	Target Perubahan
1	2	3	4	6	7
MISI 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL					
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,81	81,97
		Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	80,44	80,44
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,56	72,93
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik	Baik
		Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,40	53,70
		Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,97
			Indeks Pemberdayaan Gender	73,85	73,85
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI					
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,40	5,75
		Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	0,59	0,63
			Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,52	0,54
MISI 3: MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI					
	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	65,5 - 66,3	68,84
		Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,90	56,66
			Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,37	99,37
			Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	93,00	93,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Awal	Target Perubahan
			Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,31	4,31
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Aman	Aman
			Indeks Demokrasi (Predikat)	Sedang	Baik (>80)
		Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Rendah	Rendah (70)
MISI 4: MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF					
	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Sedang	Tinggi
		Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	8,72	8,72
		Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,66	4,66
		Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	85.289.742	85.289.742
			Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	87.022.906	87.022.906
MISI 5: MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN					
	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	66,00	66
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB (71)
			Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,80	3,80
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP
			Indeks Persepsi Korupsi	83,00	83,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	84,00

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dianggarkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.662.806.675.784,-. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tersebut, juga ditopang oleh berbagai program dan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan yang merupakan *supporting* terhadap tercapainya sasaran pada proses bisnis utama, dengan anggaran sebesar Rp1.931.009.508.438,-. Sehingga total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.593.816.184.222,-.

Adapun rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dalam perubahan belanja pada APBD TA 2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Alokasi Anggaran Target Kinerja Daerah Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6
MISI 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL					
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,97	
		Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	80,44	403.519.792.358
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,93	327.480.193.787
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik	17.193.497.231
		Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,70	24.545.692.746
		Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	93,97	3.485.729.920
			Indeks Pemberdayaan Gender	73,85	
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI					
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,75	
		Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	0,63	301.861.172.737
			Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,54	
MISI 3: MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI					
	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	68,84	
		Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,66	943.028.856.437
			Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,37	
			Cakupan Pengelolaan	93,00	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	Anggaran
			Sampah (Persen)		
			Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,31	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Aman	37.889.021.315
			Indeks Demokrasi (Predikat)	Baik (>80)	
		Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Rendah (70)	253.607.951.172
MISI 4: MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF					
	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Tinggi	
		Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	8,72	8.715.990.293
		Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,66	7.537.944.315
		Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	85.289.742	5.721.384.649
			Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	87.022.906	
MISI 5: MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN					
	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	66	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB (71)	328.219.448.824
			Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,80	
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	
			Indeks Persepsi Korupsi	83,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	
A. Jumlah Anggaran Pencapaian Tujuan dan Sasaran					2.662.806.675.784
B. Jumlah Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.931.009.508.438
Total Anggaran (A+B)					4.593.816.184.222

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja tujuan/sasaran dengan realisasi pada tahun 2023. Kemudian dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performace gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai dan rekomendasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance inprovement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Positif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan **Progres Positif**, yaitu sebagai berikut:

Presentase tingkat capaian kinerja Indeks Pendidikan $99,80\% = (80,28 / 80,44) \times 100\%$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Negatif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan **Progres Negatif**, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Presentase tingkat capaian kinerja Indeks risiko bencana } 85,91\% = (70 - (79,86 - 70)) / 70 \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan tujuan/sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Kategori Rentang Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyajikan setiap tujuan/sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target tahun 2023, kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional.

Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama tujuan untuk mewujudkan misi dan terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan tujuan.

Secara rata-rata capaian kinerja tujuan pada tahun 2023 adalah sebesar **108,62%** dan rata-rata capaian kinerja sasaran yang dihitung dari seluruh sasaran kinerja sebesar **110,68%**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)x100%	8	9=(6/8)x100%	10=7
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indek Pembangunan Manusia	100,39	81,97	83,57	101,95	82,40	101,42	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	100,19	80,44	80,28	99,80	81,67	98,30	Baik
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	100,39	72,93	75,64	103,72	72,67	104,09	Sangat Baik
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	100,00	Baik (70)	Baik (70)	100	Sangat Baik (75)	93,33	Baik
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	100,81	53,70	54,52	101,53	55	99,13	Sangat Baik
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	100,41	93,97	93,96	99,99	93,6	100,38	Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender	98,96	73,85	72,67	98,40	73,87	98,38	Baik
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	115,00	5,75	7,03	122,26	7	100,43	Sangat Baik
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	106,78	0,63	0,77	122,22	1	77,00	Sangat Baik
		Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	100,00	0,54	0,54	100,00	0,46	117,39	Baik
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	105,10	68,84	69,50	100,96	67,00	103,73	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	109,38	56,66	57,93	102,24	52,20	110,98	Sangat Baik
		Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,94	99,37%	99,65%	100,28	100,00%	99,65	Sangat Baik
		Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	100,81	93,00%	99,35%	106,83	100%	99,35	Sangat Baik
		Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	100,94	4,31%	4,30%	99,77	5,00%	86,00	Baik
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	100,00	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100,00	Aman (80)	83,71	Baik
		Indeks Demokrasi (Predikat)	101,25	Baik (>80)	Baik (81)	101,25	Sedang (70)	115,71	Sangat Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)x100%	8	9=(6/8)x100%	10=7
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	94,92	Rendah (70)	Sedang (79,86)	85,91	Rendah (33)	41,32	Baik
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	148,40	Tinggi (3,75)	Sangat Tinggi (3,81)	101,60	Sedang (3,75)	101,60	Sangat Baik
	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	95,59	8,72	14,68	168,35	10,77	136,30	Sangat Baik
	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	105,20	4,66	7,44	159,66	5,39	138,03	Sangat Baik
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	99,27	85.289.742	169.838.260	199,13	95.512.855	177,82	Sangat Baik
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	84,72	87.022.906	109.284.473	125,58	98.166.098	111,33	Sangat Baik
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	100,94	66,00	76,79	116,35	70	109,70	Sangat Baik
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	95,60	BB (71)	B (67,33)	94,83	BB (70)	96,19	Baik
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	N/A	3,80	3,43	90,26	4,20	81,67	Baik
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	Baik
		Indeks Persepsi Korupsi	89,41	83	74,29	89,51	85,00	87,40	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	84	89,87	106,99	88,30	101,78	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian Tujuan (%)					108,62			Sangat Baik
Rata-rata Capaian Sasaran (%)						110,68			Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dari hasil analisis terhadap 5 indikator tujuan dan 24 indikator sasaran dapat diketahui bahwa 17 indikator kinerja mendapat kategori **"Sangat Baik"** dan 12 indikator mendapat kategori **"Baik"**. Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh program prioritas daerah di Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan PK Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Secara umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Berikut adalah gambaran penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dirinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Tujuan dan Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
				Lebih dari 100%	76% sampai 100%	55% sampai 75%	Kurang dari 55%
MISI 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL							
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	101,95				
1.2	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	1	99,80	√			
1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,25	√			
1.4	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	1	100,00		√		
1.5	Meningkatkan daya saing pemuda	1	101,53	√			
1.6	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	2	99,20		√		
MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI							
2	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Transportasi	1	122,26	√			
2.1	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	2	111,11	√			
MISI 3: MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI							
3	Meningkatkan Kualitas Kota Sebagai Kota Layak Huni	1	122,26	√			
3.1	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	4	101,81	√			
3.2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	2	100,63	√			
3.3	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	1	85,91		√		
MISI 4: MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF							
4	Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Ekonomi Daerah	1	101,60	√			

No	Tujuan dan Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
				Lebih dari 100%	76% sampai 100%	55% sampai 75%	Kurang dari 55%
4.1	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	1	168,35	√			
4.2	Meningkatnya Investasi	1	159,66	√			
4.3	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	2	162,36	√			
MISI 5: MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN							
5	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1	116,35	√			
5.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	5	96,32		√		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 yang telah diraih, maka pada tahun berikutnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kinerja hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahunan RPJMD 2021-2026 serta menetapkan target tahun 2024 yang disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 agar target tetap realistis.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan 1:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun 2023

Indikator Tujuan	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indek Pembangunan Manusia	100,39	81,97(%)	83,57 (%)*	101,95	82,40(%)	101,42	Sangat Baik

*)Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

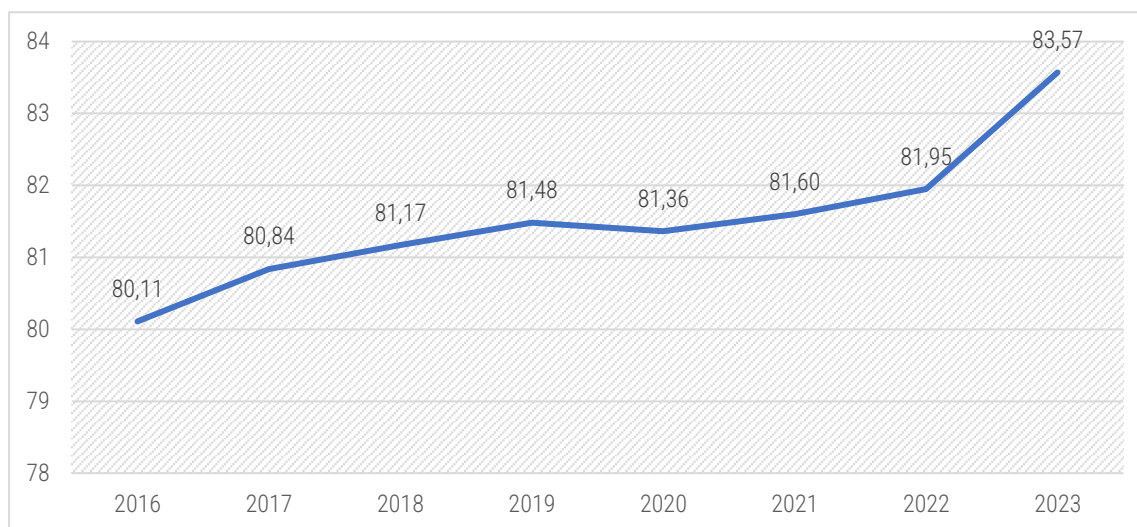
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 101,95%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 82,40 (%), maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 83,57 (%), dengan persentase capaian sebesar 101,42%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target IPM perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencapai tujuan ini menunjukkan Kota Tangerang Selatan menempati status pembangunan manusia kategori "Sangat Tinggi" (IPM >80). Nilai IPM ini dihasilkan dari komponen perhitungan IPM metode baru yang terdiri dari komponen angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mencapai 83,57, meningkat 1,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya (81,95).
- Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.
- Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.
- Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,64 tahun, meningkat 2,86 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (72,78).
- Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,67 menjadi 14,68 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun, dari 11,84 tahun menjadi 11,85 tahun pada 2023.
- Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp474.000 (3,01%) dibandingkan tahun sebelumnya 2022 sebesar Rp15.751.000 menjadi Rp16.225.000.

Berikut tren Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 s.d 2023

Gambar 3.1. Tren Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 s.d 2023



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Tahun 2023 merupakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Tren perkembangan IPM Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan positif sejak tahun 2016 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat perubahan metode penilaian berdasarkan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), yang pada awalnya menyebabkan penetapan target yang lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sehingga realisasi dapat tercapai tinggi, dan menyebabkan capaian kinerja jauh di atas 100% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 penetapan target akan kembali disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2024 agar target tetap realistis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 terealisasi sebesar 83,57 (%). Atas capaian kinerja tersebut, keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Tangerang Selatan menjadi kategori Sangat Tinggi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan IPM di Kota Tangerang Selatan adalah:

Di bidang Pendidikan tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan Pengelolaan Pendidikan antara lain, Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI), Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs), Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), serta Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi masing-masing terealisasi sebesar 100%. Selain itu, ditunjang dengan beberapa kegiatan yang berhasil diimplementasikan selama tahun 2023, antara lain:

- Rehabilitasi Gedung Sekolah sebanyak 15 Gedung SD dan 3 Gedung SMP dan pemeliharaan sebanyak 128 gedung sekolah SD dan SMP;
- Pembangunan Gedung Sekolah sebanyak 5 Gedung SD, 4 Gedung SMP dan 1 Sarpras TK Negeri Pembina. Gedung Sekolah yang dibangun khusus di Kecamatan Ciputat Timur adalah SMPN 10;
- Penyediaan meubelair sekolah sebanyak 181 sekolah SD dan SMP;
- Pemberian beasiswa bagi siswa sebanyak 6.423 siswa;
- Pemberian BOSDA bagi siswa sebanyak 77.852 Siswa SD dan 24.584 Siswa SMP; dan
- Pemberian insentif guru swasta sebanyak 4.295 terdiri dari guru dan kepala sekolah swasta.

Upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dibidang Kesehatan, berhasil mengoptimalkan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah mencapai 100% pada tahun 2023, yaitu ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin, bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah, pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik, pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah, pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah dan pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mencapai 100% pada tahun 2023, yaitu Rasio dokter per 100.000 penduduk, pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yaitu sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yaitu pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif.

Selain itu, ditunjang juga dengan kegiatan seperti:

- a. kegiatan Mantri Keliling/Ngider Sehat pada 54 Kelurahan untuk layanan kesehatan proaktif dan mobile,
- b. Perluasan cakupan Universal Health Care (UHC) dengan capaian 99,6% Masyarakat Kota Tangerang Selatan,
- c. Pemberian santunan kematian melalui pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebanyak 15.413 orang, dan
- d. Pembentukan RW Mantap (Mandiri Tahan Pangan) khusus di Kecamatan Ciputat Timur berada di kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Pisangan, Kelurahan Cempaka Putih, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, juga tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) yang berhasil tumbuh selama tahun 2023 sebesar 66,52%, optimalisasi Program Pengembangan UMKM yang berhasil dari usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 10,68%, dan optimalisasi Program Pengembangan UMKM yang berhasil masuk kedalam usaha E-Kraf sebesar 12,93% selama tahun 2023.

Pada bidang ketenagakerjaan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan antara lain berhasil melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, membuka peluang kerja melalui aplikasi, menyelenggarakan acara job fair secara rutin, melibatkan partisipasi perusahaan swasta untuk penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga Kerja (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota sebanyak 54,31%.

Selain pada optimalisasi program daerah, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil mengeluarkan beberapa kebijakan yang diimplentasikan di tahun 2023. Kebijakan tersebut yaitu:

- a. Kebijakan dalam menekan jumlah penduduk miskin, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Miskin. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan miskin serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, (2) memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan, (3) untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Wali Kota menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.
- b. Kebijakan dalam Percepatan penurunan stunting di Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya penurunan Stunting; (2) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam upaya penurunan Stunting; (3) sebagai pedoman fasilitasi penurunan Stunting yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal; (4) mewujudkan komitmen Perangkat Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penurunan Stunting di Daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas; dan (5) mengintegrasikan dan menyelaraskan penurunan Stunting di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Peningkatan akses layanan pendidikan, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk (1) meningkatkan akses layanan pendidikan, sehingga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan (2) Pembentukan sesuai dengan surat rekomendasi Gubernur Nomor 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk (1) memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk menuju masyarakat yang demokratis; (3) menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua Peserta Didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.
- e. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk (1) menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek

keterampilan; dan (2) mengembangkan potensi peserta didik dengan rancangan kurikulum yang sederhana dan fleksibel.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IPM Kota Tangerang Selatan, dikarenakan antara lain:

Dari indikator pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2020-2023) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 11,82 tahun sampai dengan 11,85 tahun. Dengan kata lain pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan setara SMA kelas dua. Begitupun dengan indikator harapan lama sekolah dalam kurun waktu tahun 2020-2023 juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 14,66 tahun sampai dengan 14,68 tahun. Hal tersebut berarti bahwa harapan masyarakat untuk bersekolah hanya mampu mencapai sekolah di akademi/ perguruan tinggi di tingkat tiga (DIII).

Dari indikator Kesehatan, Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau juga dinilai belum merata, hal ini di tandai dengan masih terdapat anak dan ibu yang mengalami permasalahan gizi makro dan mikro, seperti stunting, obesitas sentral dan gizi buruk. Pada tahun 2023, tercatat prevalensi stunting balita sebesar 9, prevalensi kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 3,12, prevalensi obesitas sentral sebesar 44,8 dan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,06. Disamping itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2023 sebesar 94,27% menunjukkan masih perlunya optimalisasi sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif, terutama respon terhadap kedaruratan kesehatan

Dari indikator pengeluaran per kapita, semenjak dua tahun pasca pandemi, pengeluaran per kapita Masyarakat Kota Tangerang Selatan baru mencapai Rp16.225.000 pertahun. Hal ini menggambarkan lambatnya pemulihan ekonomi di Kota Tangerang Selatan yang turut berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Disamping itu, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 sebesar 2,57%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,50%. Dalam lingkup pelayanan perlindungan sosial, belum digunakannya satu data sasaran yang valid dan terintegrasi menyebabkan upaya perlindungan sosial terfragmentasi dan berpotensi terjadi kesalahan sasaran. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan sosial belum adaptif sesuai kerentanan dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan-perubahan, termasuk perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Langkah ke depan yang akan dilakukan antara lain adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan APM (Angka Partisipasi Murni), peningkatan distribusi sarana pendidikan dasar, peningkatan pengajar yang belum sesuai dengan kompetensi serta peningkatan kepada pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mantri Keliling/ Ngider Sehat yang dilanjutkan untuk 54 kelurahan;
- b. Rehabilitasi Gedung Sekolah sebanyak 86 Gedung SDN dan 9 Gedung SMPN;
- c. Pembangunan Gedung Sekolah sebanyak 5 gedung SD (SDN Ciputat 1, SDN Babakan 1, SDN Muncul 1, SDN Sawah 1, SDN Pondok Betung 1) dan 5 gedung SMP (SMPN 16, SMPN 8, SMPN 7, SMPN 10, dan SMPN 23);
- d. Perluasan cakupan Universal Health Care (UHC) dengan capaian 99,6% Masyarakat Kota Tangerang Selatan;
- e. Pemberian santunan kematian melalui pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebanyak 15.413 orang;

- f. Pemberian beasiswa untuk 4.476 siswa SMP dan kesetaraan, 108 siswa SMA/ sederajat dan 721 sarjana;
- g. Pemberian BOSDA bagi siswa sebanyak 79.863 siswa SD, 26.212 siswa SMP;
- h. Pemberian insentif kepada 5.000 guru swasta dan 1.251 kepala sekolah PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan Swasta;
- i. Pemberian insentif kepada 6.000 orang kader posyandu;
- j. Pembentukan RW MANTAP (Mandiri Tahan Pangan) di Kelurahan Kademangan, Paku Alam, Pamulang Barat, Cilenggang, Cipayung, Cireundeu, Pondok Aren) dan lain sebagainya.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan

Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Indeks Pendidikan**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Pendidikan	100,19	80,44(%)	80,28(%)	99,80	81,67	98,30	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Baik dengan persentase capaian sebesar 99,80%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 81,67(%), maka pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Indeks Pendidikan sampai dengan akhir RPJMD 2026 baru mencapai 98,30%, sehingga masih harus meningkatkan nilai sebesar 1,39 dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD yang sebesar 81,67 (%).

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Data pembentuk Indeks Pendidikan diperoleh dari indikator makro yang perhitungannya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi perhitungan Indeks Pendidikan

$$I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLSmin}}{2}$$

Data Indeks Pendidikan Thn 2023

$$I \text{ pendidikan} = \frac{0,816 + 0,790}{2}$$

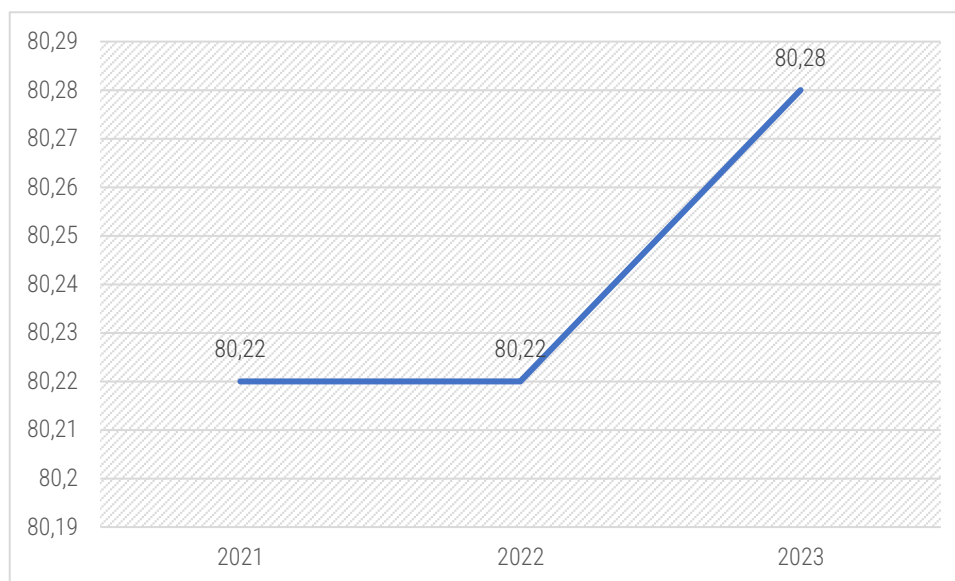
Realisasi Indeks Pendidikan Thn 2023

80,28 (%)

Selama periode Tahun 2021-2023 Indeks Pendidikan Kota Tangerang Selatan menunjukkan trend yang positif, yakni mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Rata-rata persentase peningkatan setiap tahunnya sebesar 3,74%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 7,48% atau 80,28(%). Faktor pendorong naiknya indeks pendidikan ini adalah pemberian BOSDA sampai dengan jenjang SMP, Pembangunan SDN dan SMPN, Fasilitasi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang putus sekolah, Bantuan dan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Beruntung, Beasiswa Unggulan (1000 Sarjana), Pemberian insentif guru dan kepala sekolah untuk peningkatan kesejahteraan.

Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Selatan selama 4 tahun ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Pendidikan Kota Tangerang Selatan, adalah:

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2020-2023) belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 11,82 tahun sampai dengan 11,85 tahun. Dengan kata lain pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan setara SMA kelas dua. Begitupun dengan indikator harapan lama sekolah dalam kurun waktu tahun 2020-2023 juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu antara 14,66 tahun sampai dengan 14,68 tahun. Hal tersebut berarti bahwa harapan masyarakat untuk bersekolah hanya mampu mencapai sekolah di akademi/ perguruan tinggi di tingkat tiga (DIII).

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini yaitu:

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 11,85 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/SMK melalui pemberian beasiswa, serta pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan melalui PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket A/B/C. Selain itu untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2023 telah mencapai 14,68 tahun, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin.

Dari sisi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil mengeluarkan beberapa kebijakan yang diimplementasikan di tahun 2023 sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan. Kebijakan tersebut yaitu:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Nonformal. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) penguatan Pendidikan karakter Peserta Didik untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk mengembangkan diri; penguatan spiritual; (2) meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) meningkatkan kemampuan dan penguasaan bahasa asing; (4) mengenal dan mencintai lingkungan hidup, sosial, dan budaya Daerah; (5) melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah; dan (6) pengenalan kewirausahaan;
- d. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan; (2) mengembangkan potensi peserta didik dengan rancangan kurikulum yang sederhana dan fleksibel.
- e. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) memenuhi hak pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan (3) menjamin keberlangsungan pendidikan.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Tangerang Selatan antara lain adalah:

- a. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah berupa Sarpras TK, Gedung SD dan Gedung SMP, juga ditunjang dengan pemberian BOSDA bagi siswa Siswa SD, dan Siswa SMP, serta pemberian insentif guru swasta terdiri dari guru dan kepala sekolah swasta.
- b. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang dilakukan melalui upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, begitupun dengan akselerasi angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun agar supaya capaiannya menjadi 100% antara lain penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, beasiswa dan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah usia 15-18 tahun akan terus dilakukan kolaborasi bersama Provinsi Banten agar capaiannya juga meningkat lebih dari 90%.

Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan”, penghargaan tersebut yaitu:



Penghargaan Public Service of The Year Banten 2023, Penghargaan ini diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan atas prestasinya dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan inovatif.

Sasaran 1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Angka Harapan Hidup**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Angka Harapan Hidup (tahun)	100,39	72,93	75,64*	103,72	72,67	104,09	Sangat Baik

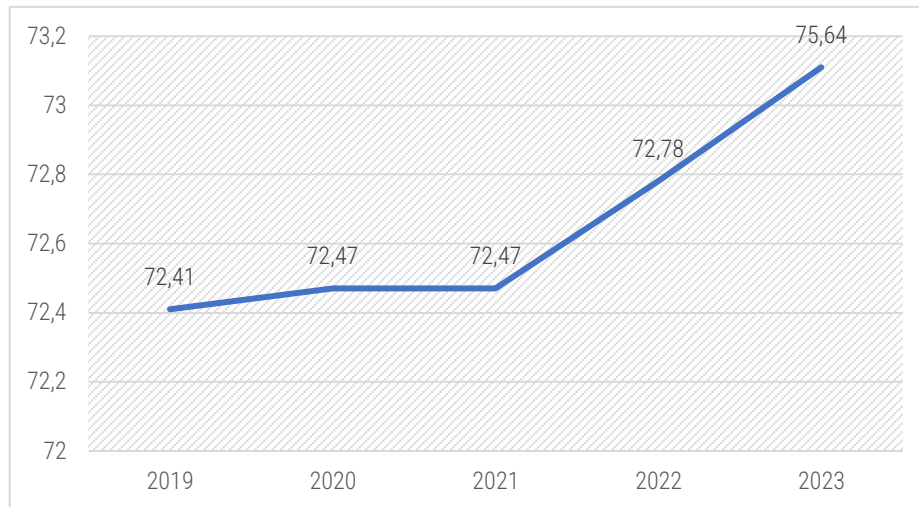
*)Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 103,72%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 72,67, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 75,64 tahun, dengan persentase capaian sebesar 104,09%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target AHH perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Angka harapan hidup di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mencapai 75,64 tahun, yang menggambarkan bahwa kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup bisa mencapai usia 76 tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran untuk sehat dari masyarakat Kota Tangerang Selatan cukup tinggi, selain itu juga sarana dan prasarana kesehatan yang ada semakin memadai.

Secara umum, AHH Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan selama periode 2019 hingga 2023, hal ini berarti bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup berhasil dalam pembangunan dan meningkatkan mutu kualitas hidup masyarakatnya. Perkembangan angka AHH Kota Tangerang Selatan selama 5 tahun terakhir disajikan pada Gambar di bawah ini:

Gambar 3.3. Perbandingan Realisasi AHH Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Berdasarkan gambar diatas, tren perkembangan AHH Kota Tangerang Selatan mengalami perkembangan positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat perubahan metode penilaian berdasarkan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), yang pada awalnya menyebabkan penetapan target yang lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sehingga realisasi dapat tercapai tinggi, dan menyebabkan capaian kinerja jauh di atas 100% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 penetapan target akan kembali disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan AHH di Kota Tangerang Selatan, dikarenakan antara lain:

- Masih terdapat anak dan ibu yang mengalami permasalahan gizi makro dan mikro, seperti stunting, obesitas sentral dan gizi buruk. Pada tahun 2023, tercatat prevalensi stunting balita sebesar 9, prevalensi kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 3,12, prevalensi obesitas sentral sebesar 44,8 dan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,06. Disamping itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2023 sebesar 94,27% menunjukkan masih perlunya optimalisasi sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif, terutama respon terhadap kedaruratan kesehatan.
- Masih terdapat penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama TBC dan Kusta. Penderita kusta tercatat sejumlah 50 penderita, sedangkan penderita TBC tercatat sejumlah 3.341 penderita. Selain penyakit menular, terdapat angka kesakitan yang tinggi untuk penyakit tidak menular hipertensi dan diabetes melitus.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:

- Mengoptimalkan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah mencapai 100% pada tahun 2023, yaitu ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin, bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar,

pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah, pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik, pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah, pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah dan pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah.

- b. Mengoptimalkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mencapai 100% pada tahun 2023, yaitu Rasio dokter per 100.000 penduduk, pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yaitu sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar, pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yaitu pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif.

Selain itu, ditunjang juga dengan kegiatan seperti:

- a. Kegiatan Mantri Keliling/Ngider Sehat pada 54 Kelurahan untuk layanan kesehatan proaktif dan mobile,
- b. Perluasan cakupan Universal Health Care (UHC) dengan capaian 99,6% Masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu, merata, dan terjangkau, melalui

- a. Perluasan cakupan Universal Health Care (UHC) Kota Tangerang Selatan.
- b. Pemenuhan cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil.
- c. Pemenuhan cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin.
- d. Pemenuhan cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- e. Pemenuhan cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- f. Pemenuhan cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- g. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar.
- h. Pemenuhan cakupan penduduk kota tangerang selatan yang memiliki jaminan kesehatan.
- i. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar.
- j. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar.

Beberapa penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat", penghargaan tersebut yaitu:



Penghargaan pembinaan program GP2SP dan K3 Perkantoran dari Kemenkes RI



Pengelola Program Imunisasi Kota Tangerang Selatan atas prestasinya sebagai Kabupaten dengan capaian Vaksin PCV Dosis 2 tertinggi dari Dinkes Provinsi Banten



Penghargaan Universal Health Coverage kepada Pemerintah Daerah dari Kemenkes RI



Capaian Kinerja SKDR Terbaik, Kelengkapan, Ketepatan dan Respon Alert sampai dengan Minggu 18 Tahun 2023 dari Dinkes Prov. Banten



Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Terbaik Pertama Sampai Bulan Juli 2023 di Tingkat Provinsi Banten



STBM Award kategori Pratama mendapatkan Peringkat III Terbaik dari Kemenkes RI



Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2023 dari Kemenkes RI



Penghargaan pembinaan program GP2SP dan K3 Perkantoran dari Kemenkes RI

Sasaran 1.3: Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Meningkatnya kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tolak ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Indeks Pembangunan Keluarga**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Meningkatnya kesejahteraan keluarga Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	100	Baik (70)	Baik (70)	100	Sangat Baik (75)	93,33	Baik

Berdasarkan laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), skor Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Tangerang Selatan sebesar 70 poin pada 2023, angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Baik dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target sebanyak 75 poin, maka pada tahun 2023 belum tercapai. Dengan demikian Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih harus meningkatkan skor sebesar 5,00 poin dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD yang sebesar 75 poin.

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, bahwa Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Keluarga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- Indeks Pembangunan Keluarga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70.
- Indeks Pembangunan Keluarga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Berdasarkan kategori tersebut, jika melihat target yang ditetapkan dalam target akhir RPJMD 2021-2026 ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, maka pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Indeks Pembangunan Keluarga perlu disesuaikan dengan kategori tersebut, yaitu maksimal Baik (75).

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.

Indeks Pembangunan Keluarga telah dirumuskan menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Tiga dimensi ditentukan mencakup:

- Dimensi ketentraman: Menjalankan ibadah, Memiliki NIK dan akta kelahiran, anak 0-17 memiliki akta lahir, setiap anggota rumah tangga memiliki jamkes, konflik keluarga, keluarga mengalami cerai hidup;
- Dimensi kemandirian: Punya sumber penghasilan, cukup makan, tinggal di rumah layak huni, punya tabungan, anak 7-18 tahun tidak putus sekolah, tidak ada anggota rumah tangga yang sakit, akses informasi media *online*;
- Dimensi kebahagiaan: setiap anggota keluarga memiliki waktu interaksi, pengasuhan anak oleh suami-istri, pernah rekreasi, ikut kegiatan sosial.

Adapun kendala dalam pencapaian kinerja ini adalah penguatan norma keluarga dan masyarakat belum optimal, permasalahan ini masuk kedalam Dimensi Kemandirian, khususnya pada variabel akses informasi media online, dimana dampak negatif dari kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi, pada prosesnya dapat mendorong kebebasan masyarakat yang kadang tanpa mengenal batas di tengah peningkatan ancaman negatif budaya global. Akibatnya terjadi perubahan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya, seperti sifat individualistis dan apatis. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan cakupan peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Rencana ke depan yang akan dilaksanakan adalah mempromosikan keluarga berkualitas, meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan, dan, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, melalui peningkatan kualitas keluarga, Implementasi Sistem data gender dan anak, lembaga Perlindungan anak aktif dan cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.

Sasaran 1.4: Meningkatkan daya saing pemuda

Meningkatkan daya saing pemuda merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Indeks Pembangunan Pemuda**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Meningkatkan daya saing pemuda Tahun 2023

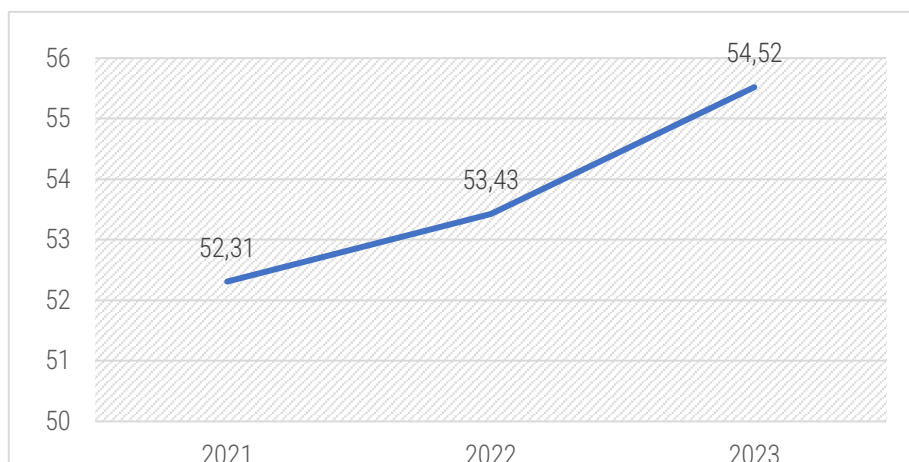
Indikator TSasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	100,81	53,70	54,52	101,53	55	99,13	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatkan daya saing pemuda** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 101,53%.

Keberhasilan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian IPP yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 3,91%. Meningkatnya nilai IPP ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi. Namun demikian, capaian ini masih belum cukup memuaskan karena baru berada pada angka 54,52 (dari nilai maksimum 100). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026), capaian indikator kinerja nilai IPP baru mencapai 99,13%, sehingga masih harus meningkatkan skor sebesar 0,48 poin dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD yang sebesar 55.

Perkembangan capaian indikator kinerja IPP cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja indikator kinerja IPP 52,31 dan meningkat menjadi 53,43 pada tahun 2022 dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 55,52, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.4. Perkembangan Capaian Realisasi Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur Pembangunan Pemuda di 5 (lima) domain dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja dan Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dihitung berdasarkan persamaan:

$$\text{IPP} = \text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5} : 5$$

Di bawah ini adalah hasil perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda di Kota Tangerang Selatan tahun 2023, yakni sebesar 54,52, yang dihasilkan dari perhitungan indikator-indikator kelima domainnya sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023

Domain	Indikator	Sumber	Kondisi Kinerja Awal	Batas minimum	Batas maksimum	Nilai Subindek (Skor Indikator)	Nilai Indeks Domain	Nilai IPP
Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11,84	0	15 (Target)	7,89	81,44	54,52
	APK SLTA/SMA dan Sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,95	0	100 (Target)	8,40		
Kesehatan dan kesejahteraan	Angka Kesakitan Pemuda	Dinas Kesehatan	5,91	0 (Target)	20	7,05	39,13	
	Pemuda Korban Kejahatan	Dinas Sosial	0,27	0 (Target)	3	9,10		
	Pemuda Merokok	Dinas Kesehatan	37,78	0 (Target)	36	-0,49		
	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Dinas Kesehatan	0,02	0 (Target)	45	10,00		
Lapangan dan Kesempatan kerja	Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,58	0	2 (Target)	2,90	52,73	
	Tingkat Pengangguran Pemuda	Dinas Ketenagakerjaan	6,59	0 (Target)	28	7,65		

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, 2024.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IPP adalah masih belum optimalnya partisipasi pemuda dalam wirausaha mandiri, yaitu baru 1,59% atau baru sebanyak 5.191 jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha dari total jumlah pemuda (umur 16- 30 tahun) sebanyak 327.034. Upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam berwirausaha perlu terus ditingkatkan karena erat kaitannya dengan upaya menumbuhkembangkan UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai sektor usaha yang bisa digeluti oleh para pemuda di Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih belum optimal, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan baru mencapai 4.54% atau sebanyak 15.038 orang jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dari 331.081 jumlah pemuda (umur 16- 30 tahun) di Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, dalam bidang peningkatan prestasi olahraga, pada tahun 2023 jumlah medali yang diperoleh oleh para atlet di Kota Tangerang Selatan dalam kompetisi nasional dan internasional sebanyak 32 medali, yang diperoleh dari kejuaraan nasional sebanyak 26 medali diperoleh dari Festival Olahraga Rekreasi Nasional, sebanyak 1 medali yang diperoleh dari Kejuaraan Tinju Nasional, 1 medali diperoleh dari Kejuaraan Tarung Derajat Nasional, 3 Medali diperoleh dari Kejuaraan Panahan Internasional dan 1 Medali diperoleh dari Kejuaraan Internasional Sea Games. Belum optimalnya prestasi olahraga erat kaitannya dengan ketersediaan prasarana olahraga yang lebih banyak pada rekreasi dan belum memenuhi standar kompetisi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IPP di Kota Tangerang Selatan adalah Pemberdayaan pemuda, perluasan cakupan akses pemuda terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, serta upaya pemberdayaan pemuda melalui program pemuda pelopor dan menumbuhkembangkan kemampuan wirausaha pemuda melalui pelatihan, perluasan cakupan akses pemuda terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan IPP antara lain adalah:

- a. Meningkatkan peran kepemudaan dan pengembangan olahraga;
- b. Peningkatan kapasitas pemuda seperti sosialisasi kegiatan kepeloporan pemuda yang menjadi salah aspek yang dinilai dalam menghitung Indeks Pembangunan Pemuda;
- c. Meningkatkan peran pengembangan olahraga;
- d. Mengoptimalkan pembinaan keolahragaan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kompetisi dan mapping potensi atlet yang berprestasi.

Sasaran 1.5: Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender

Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 1, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Indeks Pembangunan Gender** dan **Indeks Pemberdayaan Gender**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender Tahun 2023

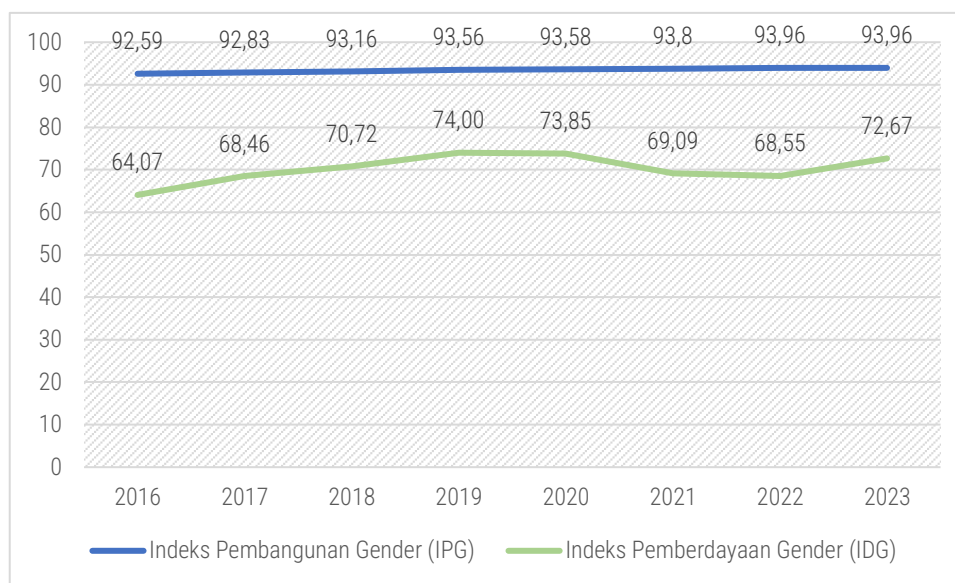
Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,41	93,97	93,96	99,99	93,6	100,38	Baik
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	98,96	73,85	72,67	98,40	73,87	98,38	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				99,10			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Baik dengan persentase rata-rata capaian sebesar 99,10%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target nilai IPG sebesar 93,6, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 93,96, dengan capaian akhir RPJMD sudah melebihi target pada tahun 2023 ini sebesar 100,38%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target IPG perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 agar target tetap realistis.

Sementara itu, capaian indikator kinerja IDG sampai dengan akhir RPJMD 2026 baru mencapai 98,38%, sehingga masih harus meningkatkan nilai sebesar 1,20 dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD yang sebesar 73,87.

Apabila melihat tren IPG, kinerja IPG mengalami peningkatan selama tahun 2016-2023 yaitu semula senilai 92,59 pada tahun 2016 menjadi 93,96 pada tahun 2023. Kinerja tersebut diraih karena upaya peningkatan keberdayaan perempuan dalam keluarga dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Sementara itu, IDG mengalami penurunan mulai tahun 2020-2022 dibandingkan tahun 2019, ini disebabkan karena penurunan kontribusi pendapatan perempuan dan penurunan pekerja perempuan profesional akibat pandemi Covid 19 yang berdampak banyaknya PHK termasuk pekerja perempuan. Namun kinerja IDG kembali menunjukkan kinerja peningkatan menjadi 72,67 tahun 2023, seiring meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dan meningkatnya persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Gambar 3.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan , diolah, 2024

Kendala utama yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan nilai IPG dan IDG adalah.

- Belum optimalnya upaya pemberdayaan kemandirian ekonomi perempuan terutama pada kelompok rentan.
- Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagai tenaga profesional.
- Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran Responsif Gender, dan
- Belum optimalnya kualitas ketahanan keluarga.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka peningkatan nilai IPG dan IDG, antara lain:

- Pemberdayaan perempuan sebagai bentuk penguatan peran perempuan yang berdaya dan cerdas dalam keluarga, bekerja sama dengan Kemenag untuk pencegahan pernikahan dini, penguatan program KB dan Bina Keluarga Berencana, pemberian insentif untuk kader PKK dan penguatan peran DWP sebagai mitra pemberdayaan dalam bina wilayah
- Penguatan pemberdayaan perempuan dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan, pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
- Penguatan pemberdayaan perempuan dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan, pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai IPG dan IDG di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

- Mengoptimalkan implementasi PUG pada tahap perencanaan melalui:
 - memastikan Perangkat Daerah menyusun Renja menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis Gender;
 - Bappelitbangda sebagai *leading* sektor mengevaluasi tolok ukur dan indikator kinerja;
 - meningkatkan komitmen dalam anggaran yang responsif Gender.

- b. Mengoptimalkan implementasi PUG pada tahap pelaksanaan adalah:
 - 1) melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi;
 - 2) memperkecil kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif Gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- c. Mengoptimalkan implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi adalah:
 - 1) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2021-2026 (Perwal No 47 tahun 2021).

Tujuan 2: Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 2, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, **Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

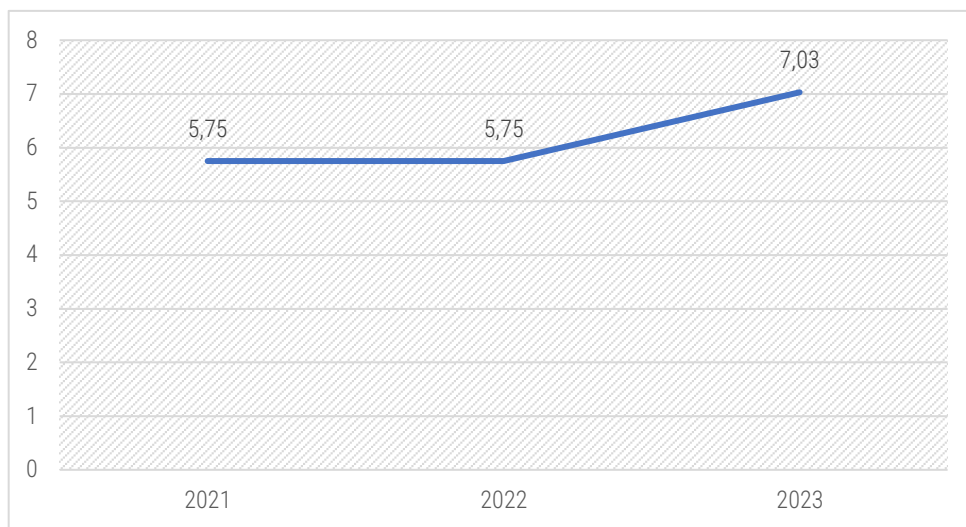
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi Tahun 2023

Indikator Tujuan	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI)	115,00	5,75	7,03	122,26	7	100,43	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan **Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 122,26%. Begitupun Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target nilai 7, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 7,03, dengan persentase capaian sebesar 100,43%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target IKLI perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 agar target tetap realistis.

IKLI disusun dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pelayanan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan. Populasi yang digunakan dalam survei IKLI sebanyak 431 responden, yang disebar ke 7 kecamatan dan 54 kelurahan dengan diwakilkan oleh 1 RW dari masing-masing kelurahan. Adapun metode analisa yang digunakan untuk menghitung IKLI menggunakan Pengukuran Skala Likert, metode analisa maupun interpretasi hasil analisa beracuan pada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Dari hasil pengukuran IKLI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 diperoleh nilai 7,03, yang berarti IKLI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berada pada rentang kategori Baik. Tren Nilai Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI) dari tahun 2021-2023 tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.6. Tren Nilai Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Berdasarkan gambar diatas, tren IKLI mengalami peningkatan selama tahun 2021-2023 yaitu semula 5,75 pada tahun 2021 menjadi 7,03 atau setara dengan mutu B (Baik) pada tahun 2023. Kinerja tersebut diraih karena upaya peningkatan kualitas infrastruktur yang dinilai berdampak pada kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur dasar Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Adapun beberapa pembangunan Infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pembangunan stasiun/rumah pompa banjir sebanyak 9 lokasi;
- Pembangunan polder/Kolam Retensi/Tandon sebanyak 2 lokasi;
- Pembangunan jalan sebanyak 45 ruas jalan;
- Pembangunan tanggul sungai sebanyak 29 lokasi;
- Pembangunan pedestrian sebanyak 3 lokasi;
- Pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan sebanyak 37 lokasi;
- Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari usulan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan Pokir DPRD sebanyak 836 titik;
- Tangsel Terang dengan Pembangunan PJU sebanyak 3.000 titik;
- Penyediaan transportasi gratis bagi pelajar dalam bentuk Bis Sekolah yang ke depan akan terintegrasi dengan layanan Circle Tangsel;
- Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan 225.432 m;
- Pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan 28.014 m dan lain sebagainya.

Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan di Kota Tangerang Selatan adalah belum terintegrasi dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat. Belum terintegrasinya antara jaringan jalan, fasilitas parkir dengan sistem transportasi menyebabkan terjadinya 36 titik kemacetan pada tahun 2023. Sistem drainase yang belum terintegrasi dengan sistem jaringan SDA menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami genangan bahkan banjir di beberapa wilayah. Belum terintegrasinya sistem evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti sistem jaringan jalan, menyebabkan ketahanan daerah terhadap bencana rendah. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang ramah dapat diakses oleh kelompok rentan seperti disabilitas, lanjut usia, wanita dan anak-anak, masih menjadi permasalahan yang dirasakan di Kota Tangerang Selatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan di Kota Tangerang Selatan adalah

- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi hingga tingkat lingkungan,
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase hingga skala lingkungan, pembangunan fasilitas transportasi, pelebaran pada beberapa ruas jalan dan simpang
- Pembangunan prasarana pemerintahan, seperti kantor kecamatan dan kelurahan; penyediaan dan pemeliharaan PSU seperti balai warga, taman lingkungan, lapangan olahraga, tandon; penanganan kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan, antara lain:

- Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan infrastruktur dasar, meliputi air minum dan sanitasi dan trantibumlinmas sesuai SPM.
- Pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman sesuai standar.
- Peningkatan konektivitas transportasi.

Sasaran 2.1: Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan

Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 2, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Rasio konektivitas Kota dan Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan Tahun 2023

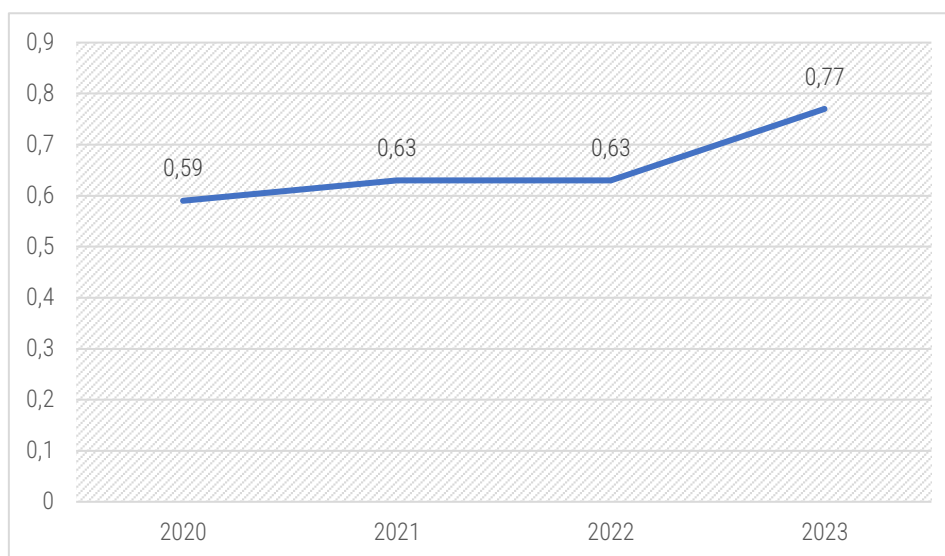
Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Rasio konektivitas Kota	106,78	0,63	0,77	122,22	1	77,00	Sangat Baik
Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	100,00	0,54	0,54	100,00	0,46	117,39	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				111,11			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dan Baik dengan persentase rata-rata capaian sebesar 111,11%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target Rasio konektivitas Kota sebesar 1, maka pada tahun 2023 baru mencapai 77,00%, sehingga masih harus meningkatkan nilai sebesar 0,23 dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD yang sebesar 1.

Sementara itu, capaian indikator kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota sampai dengan akhir RPJMD 2026 sudah mencapai dengan persentase capaian sebesar 117,39%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023 agar target tetap realistis.

Apabila melihat tren kinerja rasio konektivitas kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023 terlihat mengalami peningkatan yaitu semula 0,59 pada tahun 2020 menjadi 0,77 pada tahun 2023. Kinerja tersebut diraih karena upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi hingga tingkat lingkungan Kota Tangerang Selatan. Namun dari sisi transportasi masih belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan belum adanya layanan transportasi publik yang terintegrasi antar simpul.

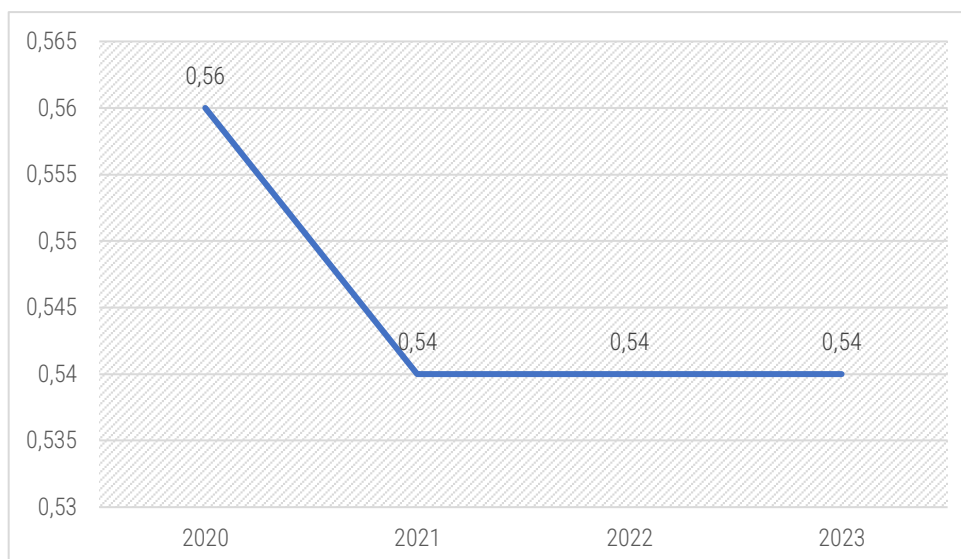
Gambar 3.7. Tren Kinerja Rasio konektivitas Kota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Sedangkan tren kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023 terlihat belum memberikan kinerja yang optimal yaitu dengan angka 0,54 tahun 2023. Salah satu yang menjadi hambatan sekaligus tantangan adalah tingginya harga lahan di Tangsel menjadi kendala dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan pelebaran jalan dan simpang yang sering macet karena volume lalin lebih besar dibandingkan kapasitas jalan/simpangnya.

Gambar 3.8. Tren Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Kendala utama yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam terkait layanan infrastruktur transportasi adalah kebutuhan pembebasan lahan yang sangat besar karena tingginya harga lahan. Selain itu, terbatasnya kapasitas jalan dan simpang juga menyulitkan operasional transportasi umum massal berbasis jalan yang membutuhkan lebar jalan dan simpang yang cukup. Sedangkan hambatan pada rasio konektivitas kota adalah belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan belum adanya layanan transportasi publik yang terintegrasi antar simpul.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan antara lain:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi hingga tingkat lingkungan.
- b. Peningkatan layanan infrastruktur wilayah dan transportasi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase hingga skala lingkungan, pembangunan fasilitas transportasi, pelebaran pada beberapa ruas jalan dan simpang.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan adalah mengembangkan sistem transportasi angkutan umum terintegrasi, meningkatkan kemantapan jalan (termasuk jembatan) dan mengoptimalkan jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan.

Tujuan 3: Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan

Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 3, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, **Indeks kota layak huni**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

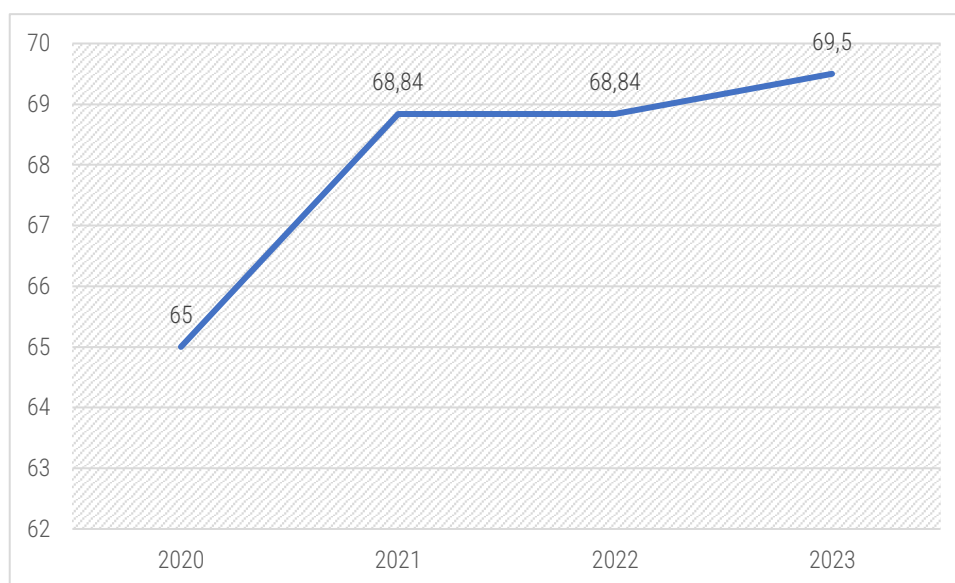
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan Tahun 2023

Indikator Tujuan	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks kota layak huni (IKLH)	105,10	68,84	69,50	100,96	67,00	103,73	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 100,96%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 67,00, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 69,50, dengan persentase capaian sebesar 103,73%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target IKLH perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Nilai IKLH Kota Tangerang Selatan dihasilkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan melalui Survey yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata kepada sebanyak 1.110 jiwa responden yang ada di Kota Tangerang Selatan meliputi 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Berikut adalah tren kinerja IKLH Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.

Gambar 3.9. Tren Kinerja Indeks kota layak huni (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Tren perkembangan nilai IKLH mengalami perkembangan positif sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 69,5 yang dapat disimpulkan bahwa Kota Tangerang Selatan secara umum berada dalam kategori layak atau baik. Capaian ini didorong oleh upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kebutuhan sarpras perkotaan dan meningkatkan cakupan akses pada pelayanan publik, seperti kantor kecamatan dan kelurahan; penyediaan dan pemeliharaan PSU meliputi balai warga, taman lingkungan, lapangan olahraga, tandon; penanganan kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penyediaan WIFI sebanyak 1009 titik di ruang Publik;
- b. Penataan kawasan kumuh seluas 35,6 hektar;
- c. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 395 unit;
- d. Pembangunan ITF;
- e. Pembangunan balai warga sebanyak 30 lokasi;
- f. Pembangunan gapura sebanyak 26 lokasi;
- g. Pembangunan sarana prasarana perumahan (lapangan olah raga, jogging track, GSG, dll) sebanyak 23 lokasi;
- h. Jumlah prasarana sarana umum yang diserahkan/ penarikan sepihak sebanyak 46 lokasi;
- i. Pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 5 lokasi;
- j. Pembangunan turap lingkungan untuk mitigasi bencana sebanyak 7 lokasi;
- k. Penataan kawasan perumahan sebanyak 3 lokasi;
- l. Pembangunan septik tank sebanyak 1.882 titik lokasi;
- m. Pembangunan 22 sumur bor dan 4 jaringan perpipaan;
- n. Pembangunan alun-alun Kecamatan Pondok Aren;
- o. Penataan taman sebanyak 35 lokasi dengan luas 30.986 m² antara lain taman Bukit Serpong Mas, Taman Plaza Rakyat disekitar Melati Mas, Taman Kota Satu, Taman Rakyat Taman Perdamaian, Taman Rakyat di Kecamatan Serpong Utara;
- p. Pembentukan 1.674 orang Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan lain sebagainya.

Kendala utama yang menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah masih adanya RUTLH menggambarkan bahwa masih adanya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan yang perlu terus diintervensi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni, meliputi penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani, luasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani, peningkatan cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kinerja kualitas lingkungan perkotaan, antara lain terus melanjutkan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni, meliputi penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani, luasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani, peningkatan cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan

Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 3, yang dinilai menggunakan 4 indikator sasaran yaitu, **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase permukiman layak huni, Cakupan Pengelolaan Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau Publik**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	109,38	56,66	57,93	102,24	52,20	110,98	Sangat Baik
Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,94	99,37%	99,65%	100,28	100,00%	99,65	Sangat Baik
Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	100,81	93,00%	99,35%	106,83	100%	99,35	Sangat Baik
Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	100,94	4,31%	4,30%	99,77	5,00%	86,00	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				102,28			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dan Baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 102,28%.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah melebihi target pada tahun 2023, maka pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023. Sementara itu, capaian indikator kinerja Persentase permukiman layak huni, Cakupan Pengelolaan Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau Publik sampai dengan akhir RPJMD 2026 masih harus meningkatkan nilai dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD.

Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan ini didukung oleh capaian 4 indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian IKLH Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2023 sebesar 57,93 (Kategori Sedang) dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 51,8. Terdapat kenaikan sebesar 1,27 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian per indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air : 66,70 (Kategori Sedang)
- Indeks Kualitas Udara : 71,08 (Kategori Sedang)
- Indeks Kualitas Lahan : 36,34 (Kategori Kurang)

Realisasi kinerja IKLH capaian kinerjanya adalah 102,24%. Capaian ini Sangat Berhasil, melebihi target yang diperjanjikan. Realisasi IKLH tahun 2023 dihitung dari:

Formulasi Perhitungan IKLH

$$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + 0,099 \times \text{IKAL})$$

Data IKLH Thn 2023

$$\text{IKLH} = (0,340 \times 66,7) + (0,428 \times 71,08) + (0,133 \times 36,34) + 0,099 \times 0)$$

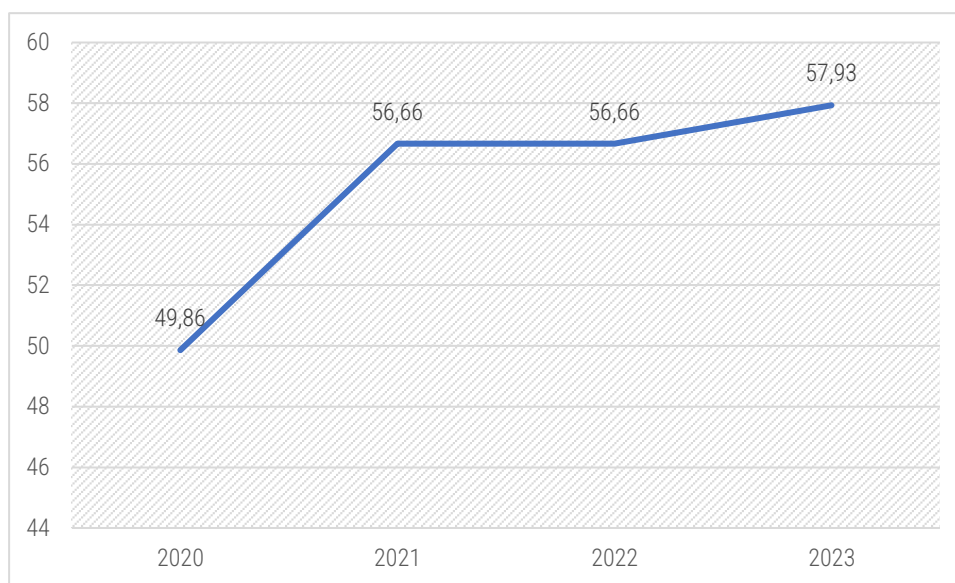
Realisasi IKLH Thn 2023

57,93

Berdasarkan data yang disajikan di atas, realisasi IKLH tahun 2023 sebesar 57,93, dan telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang lingkungan hidup secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu dilakukan evaluasi kembali pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimana ada perubahan bobot perhitungan berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024. Berikut merupakan capaian IKLH dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 3.10. Tren Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Kondisi lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan semakin membaik dari tahun 2020 sampai 2023, dimana pada tahun 2020 IKLH sebesar 49,86 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 IKLH telah mencapai 57,93. Nilai IKLH mengalami kenaikan hal ini terjadi disebabkan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengendalian terhadap pencemaran air, tanah dan udara.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja IKLH yang memiliki Nilai Kinerja Sedang (nilai 57,93) antara lain: kualitas lingkungan hidup masih berada pada 57,93 (kategori sedang), dan pengelolaan sampah perkotaan yang belum optimal, serta belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama terkait kualitas tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKLH antara lain: pengendalian terhadap pencemaran air, tanah dan udara melalui kewajiban AMDAL/UKL-UPL yang terintegrasi dengan perijinan bagi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Peningkatan cakupan pengelolaan sampah, akses jaringan air minum perpipaan dan akses terhadap sanitasi yang layak, pembangunan taman, pembuatan sumur resapan serta pengendalian limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran udara, air dan tanah.

Sedangkan dari sisi kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kinerja kualitas lingkungan hidup adalah.

Kebijakan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) Mengharmonisasikan pembangunan Kota Tangerang Selatan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; (2) Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; (3) Mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; (4) Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKLH antara lain:

- Upaya perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan.
- Peningkatan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga.
- Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan dan daratan setidaknya 30 persen dari total luas wilayah.
- Mengoptimalkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pengawasan kegiatan usaha untuk pengendalian pencemaran udara.
- Sosialisasi terkait program kampung iklim, dan
- Penataan 25 Taman dengan total luas 14.221 m².

2. Persentase permukiman layak huni

Permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28(h). Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Wujud komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Pencapaian persentase permukiman layak huni dapat dilihat dalam tabel hasil formulasi di bawah ini

Formulasi Perhitungan Persentase permukiman layak huni

$$\text{Persentase permukiman layak huni} = \frac{\text{Jumlah permukiman layak huni}}{\text{Jumlah permukiman}} \times 100$$

Data Persentase permukiman layak huni Thn 2023

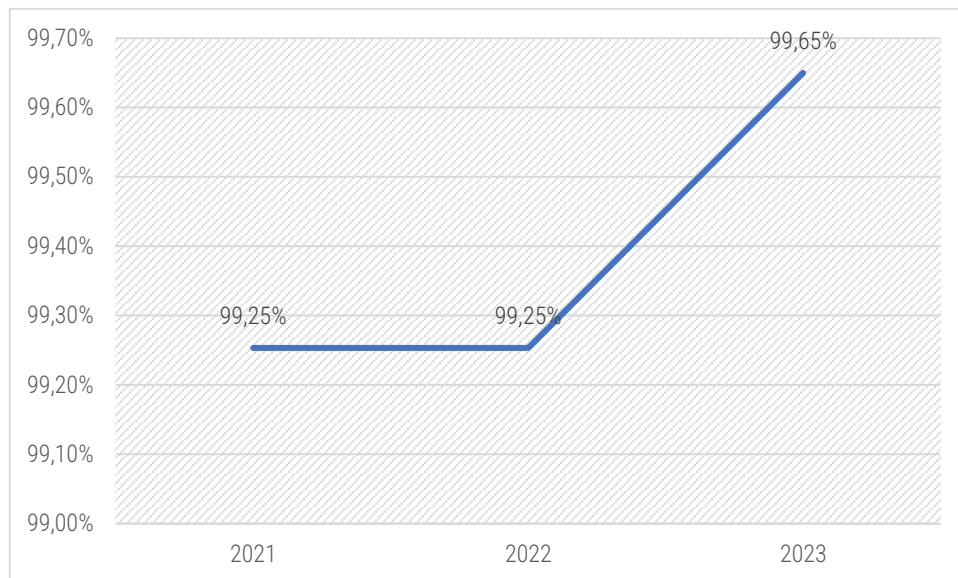
$$\text{Persentase permukiman layak huni} = \frac{377497}{378834} \times 100$$

Realisasi Persentase permukiman layak huni Thn 2023

99,65%

Realisasi persentase permukiman layak huni pada tahun 2023 terealisasi sebesar 99,65%. Atas capaian kinerja tersebut, telah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman yang layak bagi penduduk Kota Tangerang Selatan. Berikut merupakan capaian Persentase permukiman layak huni dalam 3 tahun terakhir.

Gambar 3.11. Tren Kinerja Persentase permukiman layak huni Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Perkimtan Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Kondisi permukiman layak huni Kota Tangerang Selatan semakin membaik dari tahun 2021 sampai 2023, dimana pada tahun 2021 persentase permukiman layak huni sebesar 99,25% dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 mencapai 99,65%, yang menggambarkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Tangerang Selatan tinggal pada perumahan yang layak huni. Kondisi ini didukung dengan data hasil Susenas 2023 bahwa, rumah tangga di Kota Tangerang Selatan sebagian besar telah menempati rumah milik sendiri. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri pada tahun 2023 mencapai 83,77%, sementara yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 11,03%, menempati rumah bebas sewa sebesar 4,63%, dan sisanya sebesar 0,57% menempati rumah dinas lainnya

Kendala utama yang menjadi hambatan untuk meningkatkan persentase permukiman layak huni Kota Tangerang Selatan antara lain: belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana, khususnya di perkotaan, serta akses rumah layak huni dan terjangkau yang sulit diwujudkan terutama bagi masyarakat miskin dan MBR. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penyediaan kebutuhan dasar dan rumah yang layak bagi masyarakat miskin, yang salahsatunya melalui pemberian bansos dan bedah rumah tidak layak huni.

Sedangkan dari sisi kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kinerja persentase permukiman layak huni adalah.

- a. Kebijakan tentang Perencanaan, Pembangunan Serta Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang salahsatunya dapat memberikan kontribusi terhadap permukiman layak huni melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembangunan Serta Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Skala Kecil Mandiri.
- b. Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak dalam hunian yang baik dan sehat; (2) pemenuhan tempat tinggal yang layak dalam hunian yang baik dan sehat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diperlukan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu; (3) melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mewujudkan pemenuhan tempat tinggal yang layak dalam hunian yang baik dan sehat.
- c. Kebijakan Peningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum bagi masyarakat, yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan penyediaan Air Minum bagi masyarakat; (2) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (3) meningkatkan modal; dan (4) meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- d. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Daerah atas ketersediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan, yang dilaksanakan melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Sebagai Pembeli Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Serpong. Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Daerah atas ketersediaan Air Minum melalui jaringan perpipaan; dan (2) mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem Daerah

Langkah kedepan yang akan dilakukan, berdasarkan kondisi Tahun 2023 antara lain: Optimalisasi layanan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan yang difokuskan pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat, dengan layanan sebagai berikut:

- a. Penataan kawasan kumuh seluas 28,88 hektar;
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 312 unit;
- c. Pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 11 lokasi;
- d. Penataan kawasan perumahan sebanyak 3 lokasi;
- e. Pembangunan septik tank individu untuk 662 KK;
- f. Pembangunan prasarana air minum untuk ±520 Sambungan Rumah dan lain sebagainya.

3. Cakupan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Cakupan pengelolaan sampah merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Tangerang Selatan dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Tangerang Selatan yang berhasil dikelola (m³/tahun).

Adapun hasil perhitungan pengelolaan sampah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan Cakupan
Pengelolaan Sampah

Cakupan Pengelolaan Sampah

$$= \frac{\text{Total Volume Sampah yg Dikelola}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah}} \times 100$$

Data Cakupan Pengelolaan Sampah Thn
2023

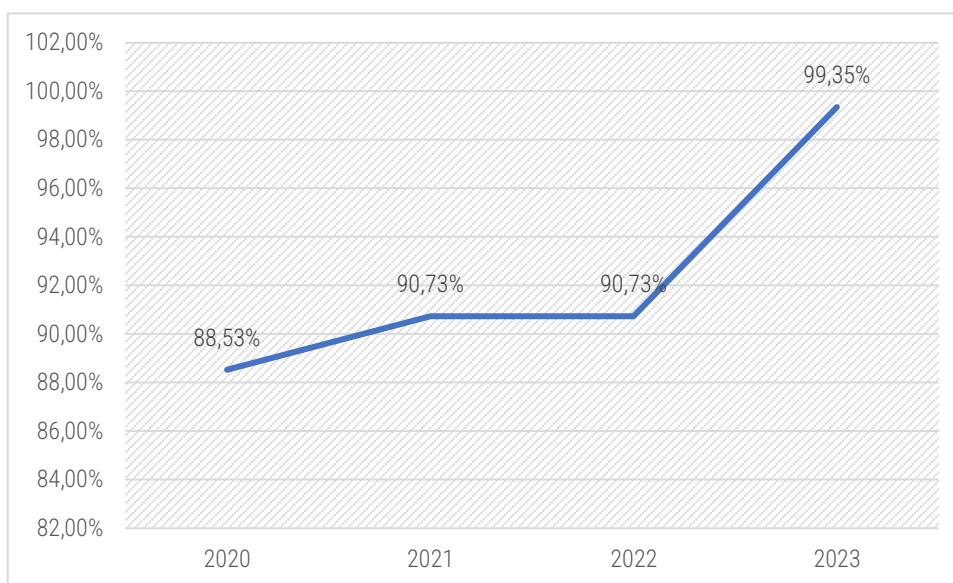
$$\text{Cakupan Pengelolaan Sampah} = \frac{1.454.257 \text{ m}^3}{1.464.137 \text{ m}^3} \times 100$$

Realisasi Cakupan Pengelolaan Sampah
Thn 2023

99,35%

Berdasarkan formula yang telah disajikan di atas terlihat cakupan pengelolaan sampah adalah sebesar 99,35% Tahun 2023. Berikut merupakan capaian cakupan pengelolaan sampah dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 3.12. Tren Kinerja cakupan pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Pencapaian Cakupan Pengelolaan Sampah telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program pengelolaan LH, pembangunan dan perluasan TPA Cipeucang, pengembangan bank sampah, aktivasi TPS 3R dan bank sampah untuk pengurangan sampah, penetapan kebijakan restoran minim sampah, pembatasan penggunaan kantong plastik, fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan rumah minim sampah, kerjasama pengelolaan sampah dengan Kota Serang dan Provinsi Jawa Barat, penambahan sarpras pengelolaan sampah, optimalisasi operasional TPA Cipeucang. Terlepas dari pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih dihadapkan beberapa tantangan antara lain: pengelolaan sampah perkotaan yang belum optimal dilaksanakan, seperti masih terbatasnya lahan

dan kapasitas penampungan TPA Cipeucang, sehingga sisa timbunan sampah kota belum bisa tertangani 100%.

Beberapa kendala yang dihadapi terkait Cakupan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut.

- a. Pada dasarnya, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki peraturan yang cukup memadai terkait pengelolaan sampah, yaitu: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah; dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan penyimpangan terhadap Peraturan Daerah yang telah dibuat. Sanksi yang ada dalam peraturan belum benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini dikarenakan karena masih belum adanya pengawasan langsung pemerintah terhadap masyarakat, sehingga terkesan Peraturan Daerah yang telah dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat di masyarakat dan tidak tersosialisasikannya peraturan tersebut kepada masyarakat.

- b. Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan setiap harinya melibatkan Dinas LH, UPT dan Perusahaan Swasta yang mengangkut sampahnya sendiri dan membuang ke TPA Cipeucang. Pengangkutan yang dilakukan perusahaan swasta ini cukup sulit untuk diawasi dan belum ada data mengenai jumlah pengangkutan oleh swasta, sehingga perlu penyusunan mekanisme pengawasan dan pengendalian angkutan sampah swasta.
- c. Pembiayaan persampahan di Kota Tangerang Selatan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan dan retribusi. Permasalahan saat ini alokasi anggaran pengelolaan sampah pada APBD masih rendah atau hanya sebesar 4,01% dari total belanja daerah. Maka untuk menyediakan infrastruktur layanan persampahan yang optimal perlu adanya kerjasama Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS), misalnya infrastruktur pemilahan sampai dengan pengangkutan menggunakan pengadaan barang/jasa tradisional kemudian pengolahan dan pemrosesan menggunakan BLPS.
- d. Meski peran masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan pengelolaan sampah, namun total pengurangan sampah masih dibawah 30% dari target Jakstrada atau baru 19,53% (196,47 ton/hari). Kondisi ini terlihat dari masih kuatnya kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah begitu saja dan tanpa terlebih dulu memilah-milah sampah organik dan sampah anorganik serta masih tingginya kebiasaan untuk memakai barang yang sulit terurai serta masih sedikitnya kegiatan daur ulang sampah. Begitupun dengan sektor swasta yang belum optimal membantu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan persampahan. Dengan demikian, sektor pengelolaan sampah mandiri perlu segera diakselerasi karena target pengurangan sampah sebesar 30% bertumpu pada pengolahan sampah mandiri.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung ketercapaian kinerja cakupan pengelolaan sampah adalah aktivasi TPS 3R dan bank sampah untuk pengurangan sampah, penetapan kebijakan restoran minim sampah, pembatasan penggunaan kantong plastik, fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan rumah minim sampah, kerjasama pengelolaan sampah dengan Kota Serang dan Provinsi Jawa Barat, penambahan sarpras pengelolaan sampah, optimalisasi operasional TPA Cipeucang.

Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan pencapaian indikator cakupan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut.

- Mengoptimalkan pemilahan sampah yang dapat terpilah dari sumbernya.
- Mengoptimalkan peran Rumah Minim Sampah, melalui pembatasan timbulan sampah di sumber sampah seperti pembatasan timbulan sampah organik dan sampah plastik sekali pakai.
- Menguatkan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- Meningkatkan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Menguatkan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan.
- Meningkatkan Kapasitas Pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya untuk peningkatan pelayanan persampahan.
- Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, operasional dan pemeliharaan.
- Mengoptimalkan retribusi pelayanan persampahan.

4. Ruang Terbuka Hijau Publik

Kota Tangerang Selatan mempunyai luas wilayah sebesar 16.485 Ha, sampai tahun 2023 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia seluas 708,88 Ha atau sekitar 4,30% dari luas Kota Tangerang Selatan. RTH tersebut tersebar di beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun persentase RTH dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan Ruang Terbuka Hijau Publik

$$\text{Ruang Terbuka Hijau Publik} = \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100$$

Data Ruang Terbuka Hijau Publik Thn 2023

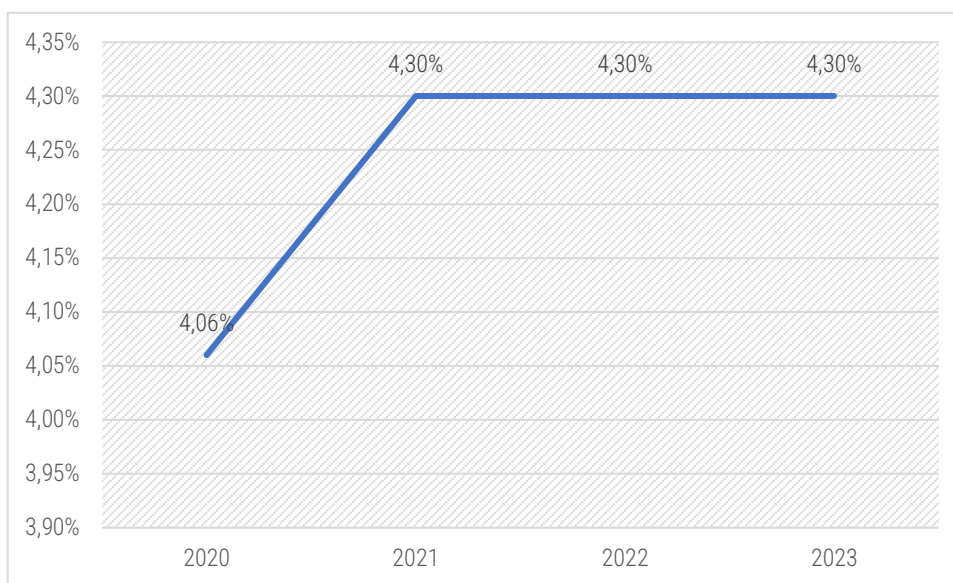
$$\text{Ruang Terbuka Hijau Publik} = \frac{708,88}{16.485} \times 100$$

Realisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Thn 2023

4,30

Walaupun luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan masih jauh dari target Nasional sebesar 30% dari luas kota secara keseluruhan, namun pemerintah Kota Tangerang Selatan komitmen untuk mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain. Berikut merupakan capaian Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 3.13. Tren Kinerja Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian PSU perumahan dan kawasan permukiman yang harus disediakan sesuai standar. Sampai dengan tahun 2023, realisasi penyediaan RTH di Kota Tangerang Selatan sebesar 4,30% dari keseluruhan wilayah kota atau setara dengan 708,88 ha dari standar penyediaan RTH publik sebesar 30%.

Kendala utama yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik dan tingginya harga lahan di Kota Tangerang Selatan, selain itu, masih adanya alih fungsi lahan berkontribusi terhadap pengurangan luas RTH publik.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pelaksanaan RTH, antara lain: Mendorong peningkatan penyediaan RTH publik oleh pengembang melalui pengaturan dalam RDTR, penambahan RTH melalui pembangunan taman-taman lingkungan dan perluasan lahan TPU.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan RTH, antara lain terus melanjutkan penyediaan RTH, meliputi: Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan dan daratan setidaknya 30% dari total luas wilayah, Koordinasi dengan pengembang terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga dapat menambah luasan RTH, Meningkatkan koordinasi antar lembaga/institusi terkait dalam pengelolaan RTH, Melibatkan peran serta aktif kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH publik maupun private, dan Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan RTH.

Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan”, penghargaan tersebut yaitu.



Penghargaan Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup

Sasaran 3.2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 3, yang dinilai menggunakan 2 indikator sasaran yaitu, **Indeks Rasa Aman (Predikat)** dan **Indeks Demokrasi (Predikat)**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Rasa Aman (Predikat)	100,00	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100,00	Aman (80)	83,71	Baik
Indeks Demokrasi (Predikat)	101,25	Baik (>80)	81	101,25	Sedang (70)	115,71	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				100,63			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Baik dan Sangat Baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 100,63%.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026, indikator Indeks Demokrasi sudah melebihi target pada tahun 2023, maka pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Indeks Demokrasi perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023. Sementara itu, capaian indikator kinerja Indeks Rasa Aman sampai dengan akhir RPJMD 2026 masih harus meningkatkan nilai dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD.

Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan ini didukung oleh capaian 2 indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

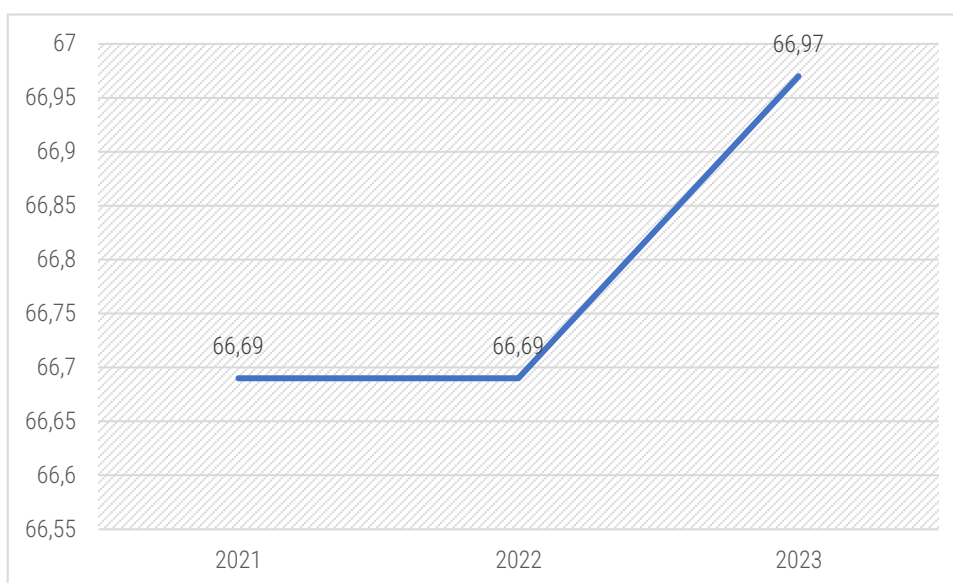
1. Indeks Rasa Aman

Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendefinisian “Rasa Aman” disebutkan dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Ada empat komponen yang terdapat dalam indikator rasa aman, antara lain Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan angka kriminalitas.

Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman dalam 3 tahun terakhir.

Gambar 3.14. Tren Kinerja Indeks Rasa Aman di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, diolah, 2024

Indeks Rasa Aman menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2023, Angka Indeks Rasa Aman Kota mencapai angka 66,97 meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan meningkatnya kinerja penegakan perda/ perwal, kerjasama dengan Forkominda untuk penyelenggaraan keamanan lingkungan, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Rasa Aman adalah belum optimalnya penegakan Perda/Perwal dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan Indeks Rasa Aman adalah optimalisasi kinerja penegakan perda/ perwal, kerjasama dengan Forkominda untuk penyelenggaraan keamanan lingkungan

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dalam meningkatkan Indeks Rasa Aman, antara lain:

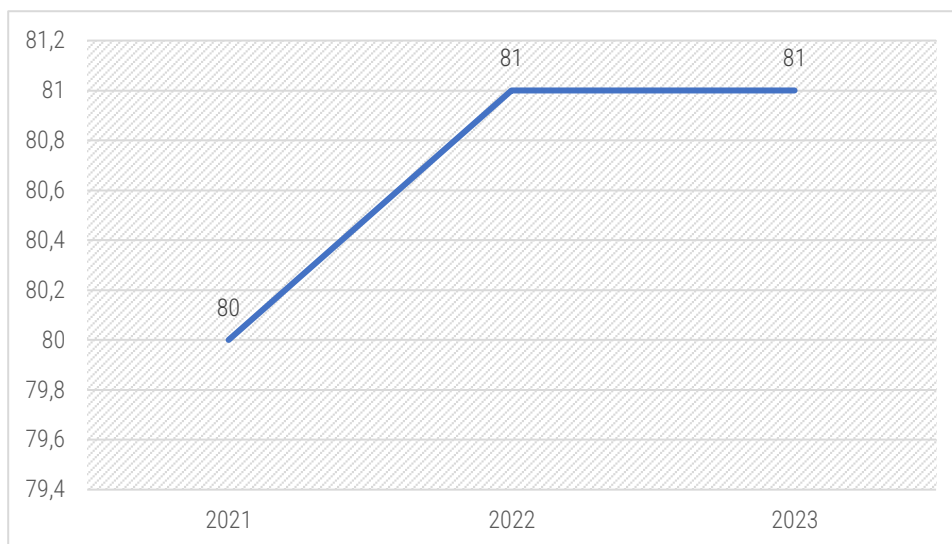
Penanganan, saran dan masukan, menyediakan infrastruktur pengaduan yang berbasis digital, seperti aplikasi pengaduan dengan menyediakan petugas operator yang dapat mersepon segala bentuk pengaduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat mempermudah pengguna layanan.

2. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Kota Tangerang Selatan. Tinggi rendahnya Indeks Demokrasi tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya akan semakin tinggi pula Indeks Demokrasi. Skalanya dari 1 – 100 dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu Baik (indeks >80), Sedang (indeks 60-80) dan Kurang (indeks <80).

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, realisasi kinerja indikator Indeks Demokrasi adalah predikat Baik dengan nilai 81. Berikut merupakan capaian Indeks Demokrasi dalam 3 tahun terakhir.

Gambar 3.15. Tren Kinerja Indeks Demokrasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Indikator indeks demokrasi yang memiliki capaian pada tahun awal 2021 berupa sedang dan meningkat menjadi baik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya seluruh unsur masyarakat, media massa dan stake holder dalam perencanaan kebijakan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk membenahi dan memperbaiki pelibatan seluruh unsur masyarakat, media massa dan stake holder dalam perencanaan kebijakan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga Indeks Demokrasi di Kota Tangerang Selatan terus meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Indeks Demokrasi yang memuaskan, upaya ke depan yang akan dilaksanakan adalah dengan terus meningkatkan kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi bagi tokoh masyarakat, peningkatan sosialisasi pemilihan umum tingkat kelurahan se kota tangerang selatan, peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi bagi mahasiswa dan peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi bagi tokoh pemuda.

Sasaran 3.3: Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam

Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 3, yang dinilai menggunakan 1 indikator sasaran yaitu, **Indeks resiko bencana**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

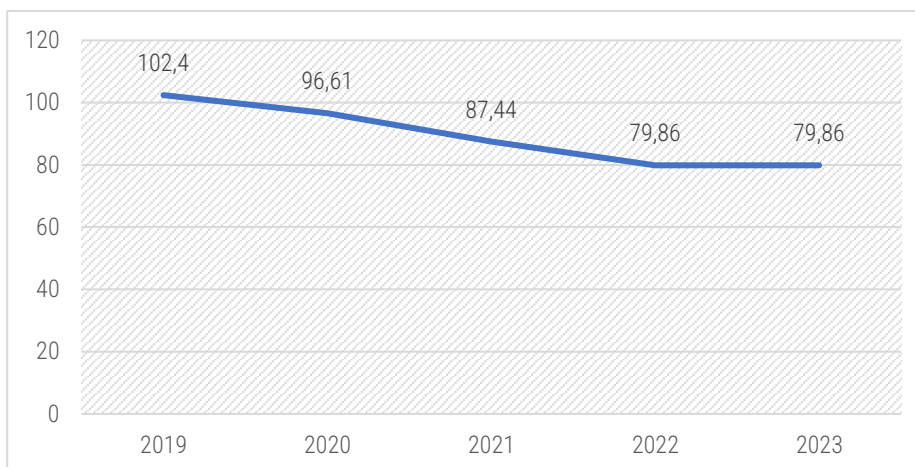
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks resiko bencana (IRB)	94,92	Rendah (70)	Sedang (79,86)	85,91	Rendah (33)	41,32	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Baik dengan persentase capaian sebesar 85,91%. Namun, jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target Rendah (33), maka masih harus meningkatkan nilai menjadi Rendah dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD.

Berikut adalah tren kinerja IRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023.

Gambar 3.16. Tren Kinerja Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diolah, 2024

Hingga tahun 2023, Indeks Risiko Bencana masih menunjukkan hal positif dengan tren menurun. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan mitigasi bencana dengan melakukan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta upaya maksimal dalam penanganan korban bencana.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan Inovasi dengan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.1/Kep.279-Huk/2023 tentang Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menilai akibat, dampak, perkiraan kebutuhan dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana yang dilaksanakan oleh tim reaksi cepat, dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.1/Kep.286-Huk/2023 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merespon cepat setiap kejadian darurat bencana

Beberapa kendala yang dihadapi dalam menurunkan risiko bencana di Kota Tangerang Selatan adalah: Belum adanya sistem komando penanganan bencana yang terintegrasi dan responsif (RPB belum tersusun), Pelaksanaan program penanggulangan bencana belum mengadopsi konsep mitigasi bencana, EWS dan penanganan bencana yang responsif.

Upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan dalam menurunkan risiko bencana, antara lain: Mengoptimalkan kesiagaan di masyarakat, mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana terutama terkait pengembangan sistem informasi yang responsif, penyelenggaraan diklat SDM kebencanaan, penyediaan logistik yang tepat sasaran, penanganan tematik kawasan bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Sedangkan pada penanganan bencana kebakaran akan mengoptimalkan semua wilayah di Kota Tangerang Selatan terlayani oleh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian “Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam”, penghargaan tersebut yaitu.



Penghargaan Juara Umum Jambore Kebencanaan tingkat Provinsi Banten dari BPBD Provinsi Banten

Tujuan 4: Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah

Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 4, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, **Indeks Daya Saing Daerah**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah Tahun 2023

Indikator Tujuan	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	148,40	Tinggi (3,75)	Sangat Tinggi (3,81)	101,60	Sedang (3,75)	101,60	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 101,60%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target Sedang (3,75), maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 3,81, dengan persentase capaian sebesar 101,60%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target IDSD perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi.

Perhitungan IDSD Kota Tangerang Selatan mengacu pada Buku IDSD tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Secara detail capaian kinerja IDSD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

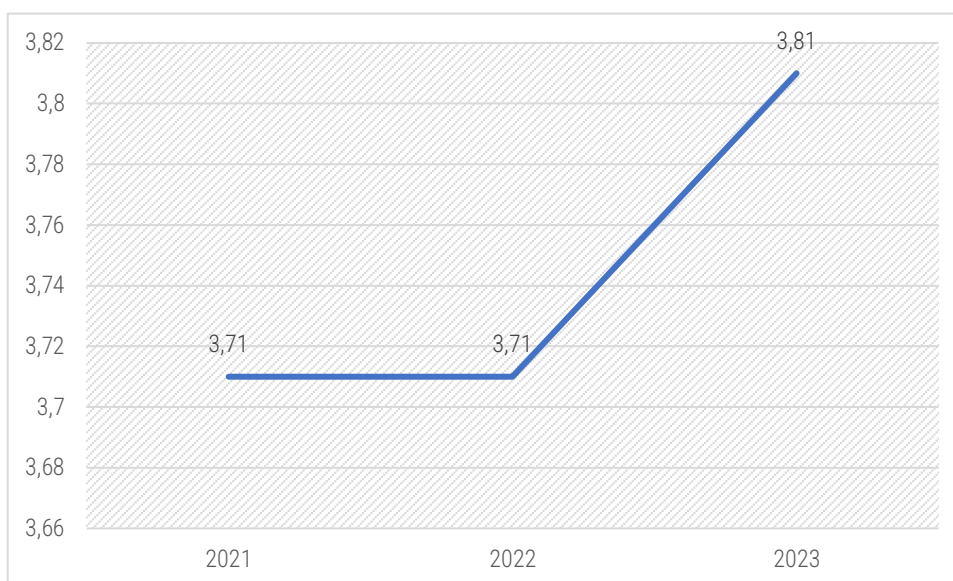
Dimensi Pengukuran	Indeks	Kategori
Pilar 1 : Institusi	4,14	Sangat Tinggi
Pilar 2 : Infrastruktur	3,75	Tinggi
Pilar 3 : Adopsi TIK	4,93	Sangat Tinggi
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	3,54	Tinggi
Pilar 5 : Kesehatan	4,06	Sangat Tinggi
Pilar 6 : Keterampilan	4,11	Sangat Tinggi
Pilar 7 : Pasar Produk	5,00	Sangat Tinggi
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	3,81	Sangat Tinggi
Pilar 9 : Sistem Keuangan	1,29	Sedang
Pilar 10 : Ukuran Pasar	4,94	Sangat Tinggi
Pilar 11 : Dinamisme Bisnis	2,65	Tinggi
Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	3,48	Tinggi
Nilai IDSD Kota Tangerang Selatan	3,81	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tujuh pilar memiliki skor tertinggi adalah pilar Institusi, Adopsi TIK, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Ukuran Pasar. Namun demikian masih terdapat satu dimensi yang perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor, yaitu pada pilar 9 (sistem keuangan). Pilar 9 ini terkait dengan capaian indikator Memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi risiko krisis keuangan dengan penuh kehati-hatian dan memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif, juga indikator meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran, sehingga terkait capaian Pilar 9 ini, perlu upaya keras untuk meningkatkan skor kinerjanya di tahun berikutnya.

Berikut adalah tren kinerja IDSD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.

Gambar 3.17. Tren Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, diolah, 2024

Berdasarkan data indeks daya saing daerah, Kota Tangerang Selatan dikategorikan sebagai Kota Berdaya Saing Sedang pada tahun 2021, kemudian tahun 2022 menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi dan pada tahun 2023 menjadi Kota Berdaya Saing Sangat Tinggi. Hal ini disebabkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja daya saing daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IDSD di Kota Tangerang Selatan adalah:

- Belum optimalnya hasil penelitian yang mendukung kualitas kebijakan penyelenggaraan daerah.
- Inovasi sudah cukup banyak, tetapi masih cenderung persektor sesuai tupoksinya masing masing, atau masih berfokus pada aplikasi saja.
- kapabilitas inovasi berada pada kategori sedang yang memerlukan upaya untuk dapat ditingkatkan

Bentuk upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengintervensi peningkatan IDSD antara lain: Intervensi program pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur perekonomian; kerjasama dengan lembaga penelitian, riset, dan inovasi, lembaga akademik dan tokoh praktisi ahli untuk pelaksanaan beberapa program-program pembangunan di Kota Tangerang Selatan, serta menyusun rencana pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan IDSD, yaitu:

- Memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi risiko krisis keuangan dengan penuh kehati-hatian dan memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif, dan meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- Mengembangkan riset dan inovasi daerah yang dapat menangani permasalahan daerah dan menjawab isu strategis daerah.

Sasaran 4.1: Meningkatnya sektor ekonomi kreatif

Meningkatnya sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 4, yang dinilai menggunakan 1 indikator sasaran yaitu, **Nilai sektor ekonomi kreatif**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

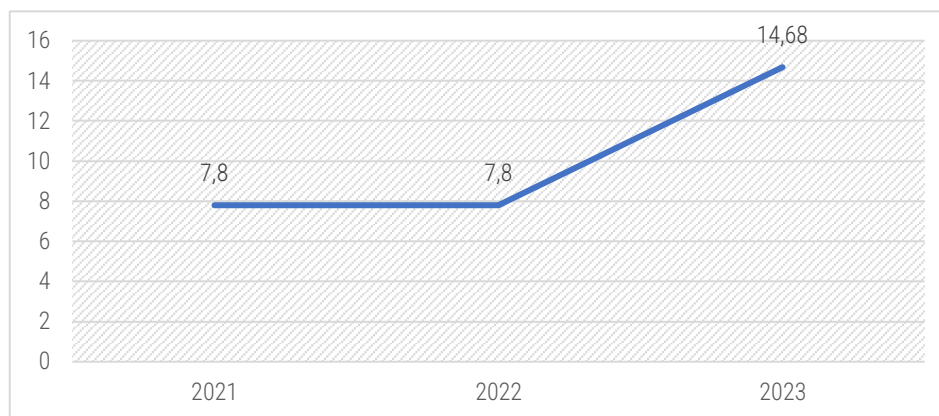
Tabel 3.19. Capaian Kinerja Meningkatnya sektor ekonomi kreatif Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	95,59	8,72	14,68	168,35	10,77	136,30	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatnya sektor ekonomi kreatif** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 168,35%, Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 10,77 triliun, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 14,68 triliun, dengan persentase capaian sebesar 136,30%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Nilai sektor ekonomi kreatif perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian yang mengedepankan kreativitas, informasi, pengetahuan dan inovasi. Dari hasil kreativitas dan pengetahuan tersebut yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa. Berikut adalah tren kinerja Nilai sektor ekonomi kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023.

Gambar 3.18. Tren Kinerja Nilai sektor ekonomi kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Nilai sektor ekonomi kreatif pada tahun 2021 dan 2021 sebesar 7,8 triliun, dan di tahun 2023 telah menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat sebesar 14,68 triliun. Hal ini menggambarkan adanya pemberdayaan pada sektor ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan. Namun peningkatan ini masih perlu upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendorong sektor industri yang meliputi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi.

Dari kondisi yang digambarkan diatas, cukup menggambarkan kondisi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang masih terdapat kendala dalam meningkatkan kinerja sektor ekonomi kreatif. Kendala tersebut, yaitu:

- a. Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro di Kota Tangerang Selatan masih relatif kecil hanya sebesar 0,29%. Selain itu, jumlah UMKM yang bergerak dalam bidang usaha kreatif masih sedikit yaitu sebesar 12,93%. Hal tersebut dapat menggambarkan belum optimalnya kontribusi UMKM dan Ekonomi Kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan rantai ekonomi nasional. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil. Hal-hal tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal, dan inovasi yang mendorong investasi di sektor Ekonomi Kreatif masih perlu ditingkatkan.
- b. Pertumbuhan UMKM yang kecil dan usaha kreatif masih sedikit disebabkan karena belum tergalinya potensi UMKM dan ekonomu kreatif yang dapat bersaing dan berorientasi ekspor. Selain itu, fasilitasi pemasaran dan akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor ekonomi kreatif masih belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan kualitas ekonomi kreatif adalah menjadikan program pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai program prioritas tahunan.

Upaya-upaya nyata/ konkret yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dalam meningkatkan nilai sektor e-kraf, antara lain:

- a. Fasilitasi pameran IKM;
- b. Operasi pasar dan bazar 7 kecamatan;
- c. Peningkatan citra produk ekspor 25 pelaku usaha
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan 25 produk;
- e. Fasilitasi sertifikasi HAKI sebanyak 94 orang;
- f. Fasilitasi sertifikasi halal 93 pelaku UMKM;
- g. Sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata yang diberikan kepada 200 orang, sertifikasi kompetensi 25 pelaku usaha ekraf;
- h. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan D3 (Dilatih, Disertifikasi, Ditempatkan) sebanyak 320 orang tenaga kerja, peningkatan keterampilan terhadap 325 pelaku UMKM dan lain sebagainya.

Sasaran 4.2: Meningkatnya Investasi

Meningkatnya Investasi merupakan salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 4, yang dinilai menggunakan 1 indikator sasaran yaitu, **Nilai investasi tahunan**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

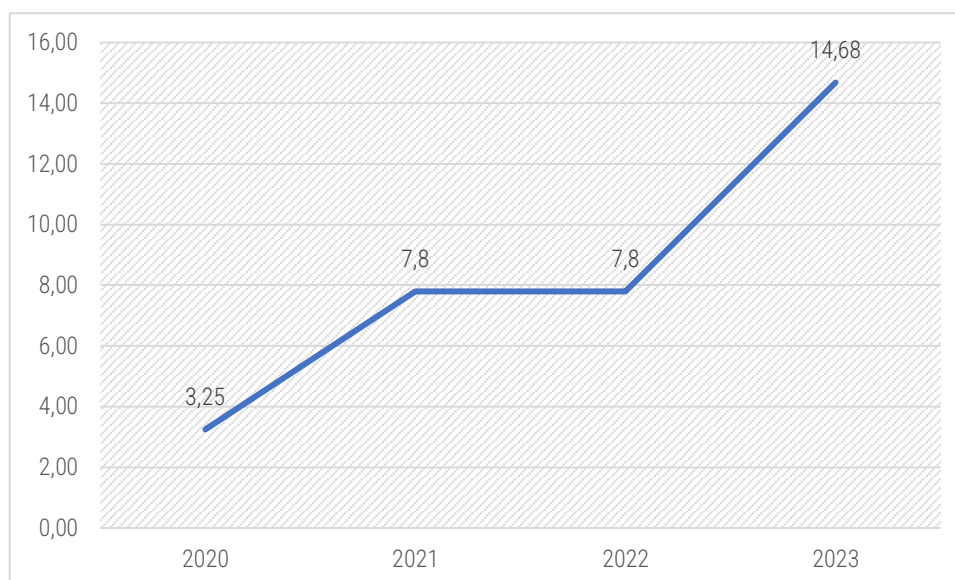
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Meningkatnya Investasi Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	105,20	4,66	7,44	159,66	5,39	138,03	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 159,66%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target Rp5,39 triliun, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai Rp7,44 triliun, dengan persentase capaian sebesar 138,03%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Nilai investasi tahunan perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Perkembangan investasi PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan. Total investasi hingga tahun 2023 tercatat sebesar Rp7,44 triliun sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 3.19. Tren Kinerja Nilai sektor ekonomi kreatif Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Sebagai faktor pendorong naiknya investasi adalah tumbuhnya ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan perijinan satu pintu dan secara online untuk menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan nilai investasi adalah: Ditinjau dari iklim investasi yang diukur melalui pendekatan nilai ICOR dimana semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi, tercatat nilai ICOR Kota Tangerang Selatan lebih kecil yang menggambarkan bahwa penciptaan investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan investasi adalah:

- a. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik terintegrasi;
- b. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya perbaikan perijinan berusaha untuk memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi;
- c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan mengintegrasikannya dengan sistem OSS sebagai instrumen kepastian pemanfaatan ruang untuk investasi;
- d. Pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan regulasi perpajakan sesuai kewenangan;
- e. Penyelenggaraan SPBE untuk pelayanan publik; dan
- f. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur.
- g. Pendampingan dan Assistensi tiap Triwulan kepada pelaku usaha dalam rangka pelaporan LKPM sehingga dapat meningkatkan jumlah investor sebanyak 8.791 dari tahun 2022 sebanyak 2.695 investor.
- h. Pameran dan Roadshow terkait Potensi Investasi Kota Tangerang selatan
- i. Kebijakan JOSS (Jemput Online Single Submission), Perizinan Expo dan Pendampingan NIB
- j. peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah
- k. Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP
- l. Pengendalian terhadap Penanaman Modal melalui sosialisasi OSS RBA dan LKPM, Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaporan LKPM
- m. Terdapat peta potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dalam meningkatkan nilai investasi, antara lain: Menumbuhkembangkan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan perijinan satu pintu untuk menarik investasi yang dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sasaran 4.3: Meningkatnya produktifitas tenaga kerja

Meningkatnya produktifitas tenaga kerja salah satu tolok ukur untuk mencapai tujuan pada Misi ke 4, yang dinilai menggunakan 2 indikator sasaran yaitu, **Produktifitas tenaga kerja per total output dan Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Meningkatnya produktifitas tenaga kerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	99,27	85.289.742	169.838.260	199,13	95.512.855	177,82	Sangat Baik
Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	84,72	87.022.906	109.284.473	125,58	98.166.098	111,33	Sangat Baik
Rata-rata Capaian				162,35			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **Meningkatnya produktifitas tenaga kerja** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian rata-rata sebesar 162,35%.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026, indikator Produktifitas tenaga kerja per total output sudah melebihi target pada tahun 2023, maka pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Produktifitas tenaga kerja per total output perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023. Begitupun dengan, capaian indikator kinerja Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa sampai dengan akhir RPJMD 2026 dengan target 98.166.098, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 109.284.473, dengan persentase capaian sebesar 111,33%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Produktifitas tenaga kerja per total output dan Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Dalam mencapai sasaran strategis **Meningkatnya produktifitas tenaga kerja** ini didukung oleh capaian 2 indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

1. Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Adapun data produktivitas tenaga kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan Produktivitas tenaga kerja per total output

$$\frac{(PDRB \text{ Harga Berlaku})}{angkatan \text{ kerja} - jumlah \text{ pengangguran terbuka}}$$

Data Produktivitas tenaga kerja per total output Thn 2023

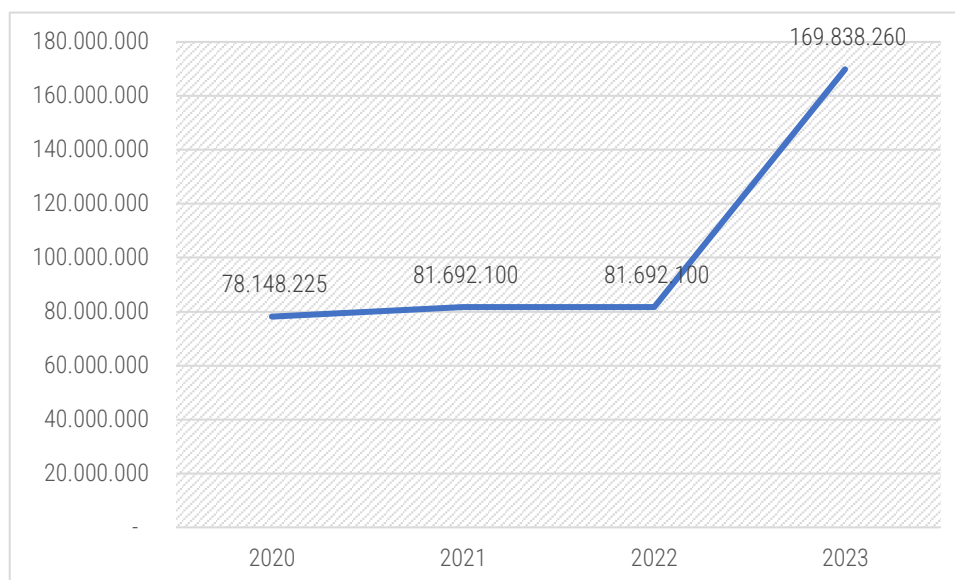
$$\frac{104.387.690.000.000}{652.575 - 37.945}$$

Realisasi Produktivitas tenaga kerja per total output Thn 2023

169.838.260

Tren perkembangan Produktivitas tenaga kerja per total output sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.20. Tren Kinerja Produktivitas tenaga kerja per total output Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Realisasi produktivitas tenaga kerja tahun 2022 tercatat sebesar Rp81.692.100, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi Rp169.838.260. Peningkatan ini terjadi karena fasilitasi serta kerjasama penyaluran tenaga kerja dengan perusahaan/tempat usaha. Selain itu, dengan mendorong para pencari kerja untuk berwirausaha, memberikan bimbingan teknis/pelatihan berwirausaha melalui pemberian bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui kegiatan Padat Karya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah:

- Masih tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA umum sebesar 40,15%. Selain itu, adanya pengangguran lulusan universitas yang mencapai 23,27%.
- Masih terdapat kesenjangan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja dalam bentuk kelebihan penawaran (*excess supply*). Artinya, jumlah orang yang ingin bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah mendukung program percepatan pemulihan ekonomi guna menjaga produktivitas ekonomi tetap terjaga, antara lain: pemulihan sektor usaha mikro, pemulihan sektor perdagangan, penguatan ketahanan dan keamanan pangan, pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemulihan sektor tenaga kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menstimulus perekonomian Kota Tangerang Selatan yang berdampak pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, antara lain: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang bersumber dari sektor ekonomi dengan serapan tenaga kerja yang signifikan serta meningkatkan pendapatan utamanya masyarakat yang saat ini masih dengan penghasilan rendah, serta mengoptimalkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengadakan pendidikan vokasi yang sinkron dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Tangerang Selatan.

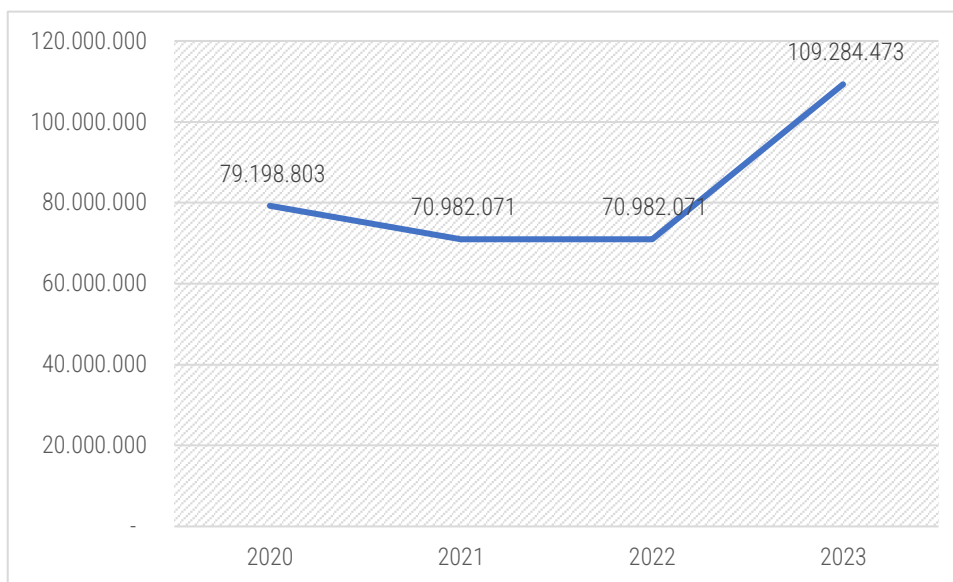
2. Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)

Realisasi kinerja indikator Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa adalah sebesar Rp109.284.473 dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan Produktivitas sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	$\frac{(\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa})}{\text{angkatan kerja sektor perdagangan dan jasa}}$
Data Produktivitas sektor perdagangan dan jasa (Rupiah) Thn 2023	$\frac{39.692.230.000.000}{363.201}$
Realisasi Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa Thn 2023	109.284.473

Tren perkembangan Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.21. Tren Kinerja Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Sektor perdagangan dan jasa menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari perkembangannya yang menunjukkan tren meningkat hingga pada tahun 2023 sebesar Rp109.284.473. Peningkatan ini salahsatunya dipengaruhi oleh upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan program-program pelatihan tenaga kerja untuk sektor usaha perdagangan dan jasa dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa antara lain: Masih rendahnya penyerapan dan produktivitas tenaga kerja lokal.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa antara lain adalah: Menumbuh kembangkan usaha informal dan ekonomi kreatif yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pelatihan tenaga kerja untuk sektor usaha perdagangan dan jasa untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam sektor perdagangan dan jasa.

Tujuan 5: Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu tolok ukur untuk Misi ke 5, yang dinilai menggunakan indikator tujuan yaitu, **Indeks Reformasi Birokrasi**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien Tahun 2023

Indikator Tujuan	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Indeks Reformasi Birokrasi	100,94	66,00	76,79	116,35	70	109,70	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan **Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 116,35%. Begitupun jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026 dengan target 70, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 76,79, dengan persentase capaian sebesar 109,70%. Dengan demikian pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Indeks Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Keputusan menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 2 RB yaitu RB General dan RB Tematik pengungkit kemudian dibandingkan dengan bobot kedua RB dan hasilnya dikonversi ke angka 100, sehingga realisasi indikator kinerja ini menjadi 76,79 dengan predikat BB, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

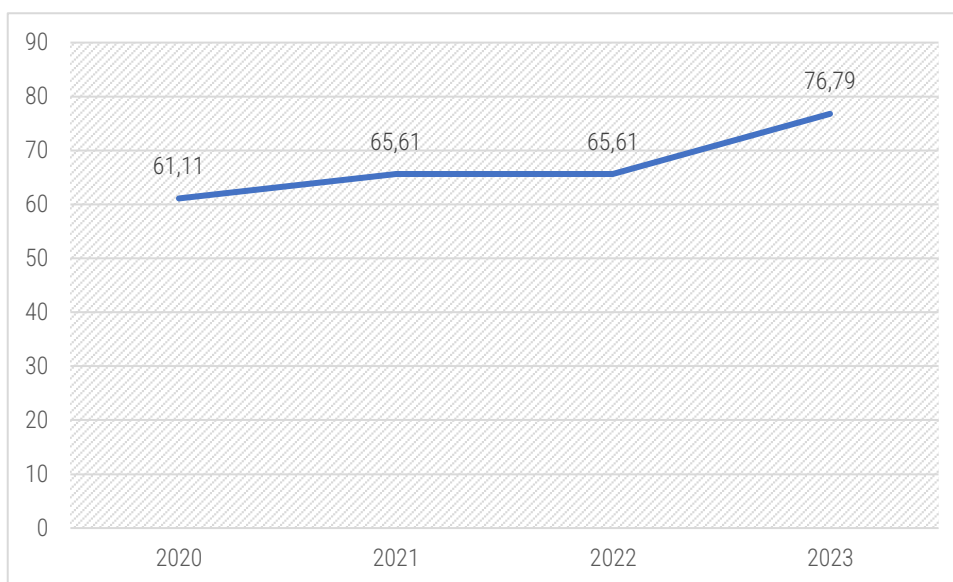
Tabel 3.23. Komponen Capaian Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	65,56
B	RB Tematik	20	11,23
C	Indeks RB	120	76,79
			BB

Sumber: Menteri PANRB, 2024

Sebagai catatan bahwa capaian tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Namun sebagai gambaran mengenai tren kinerja Indeks Reformasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.22. Tren Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bagian Organisasi Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari 65,61 di tahun 2022 menjadi 76,79 dengan kategori BB di tahun 2023. Salah satu faktor yang menyebabkan Indeks RB meningkat adalah dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi dalam melakukan berbagai perubahan dan program untuk memperbaiki kondisi yang ada serta pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan yang disampaikan Kementerian PAN dan RB, sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB.

Kendala utama yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya dukungan dan komitmen pimpinan dalam melakukan berbagai perubahan dan program untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain: Melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan yang disampaikan Kementerian PAN dan RB, sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut

- Peningkatan nilai pada area pemenuhan dan reform serta peningkatan nilai pada total komponen hasil.
- Peningkatan kompetensi ASN dengan pemberian diklat teknis dan struktural, penerapan evaluasi kinerja berbasis pencapaian output/outcome instansi.

Sasaran 5.1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu tolak ukur untuk Misi ke 5, yang dinilai menggunakan indikator sasaran yaitu, **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat**. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun ketiga RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023

Indikator Sasaran	Capaian 2022 (%)	2023			Target RPJMD 2026	Capaian thd Target RPJMD Th.2026 (%)	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	95,60	BB (71)	B (67,33)	94,83	BB (70)	96,19	Baik
Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	N/A	3,80	3,43	90,26	4,20	81,67	Baik
Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	Baik
Indeks Persepsi Korupsi	89,41	83	74,29	89,51	85,00	87,40	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	84	89,87	106,99	88,30	101,78	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja				96,32			

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan Sangat Baik dan Baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 96,32%.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD tahun 2026, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sudah melebihi target pada tahun 2023, maka pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 target Indeks Kepuasan Masyarakat perlu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023. Sementara itu, capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan akhir RPJMD 2026 masih harus meningkatkan nilai dalam tiga tahun ke depan demi memenuhi target RPJMD, sementara dengan nilai Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah dapat terus diupayakan dan dipertahankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memperoleh WTP.

Dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini didukung oleh capaian 5 indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

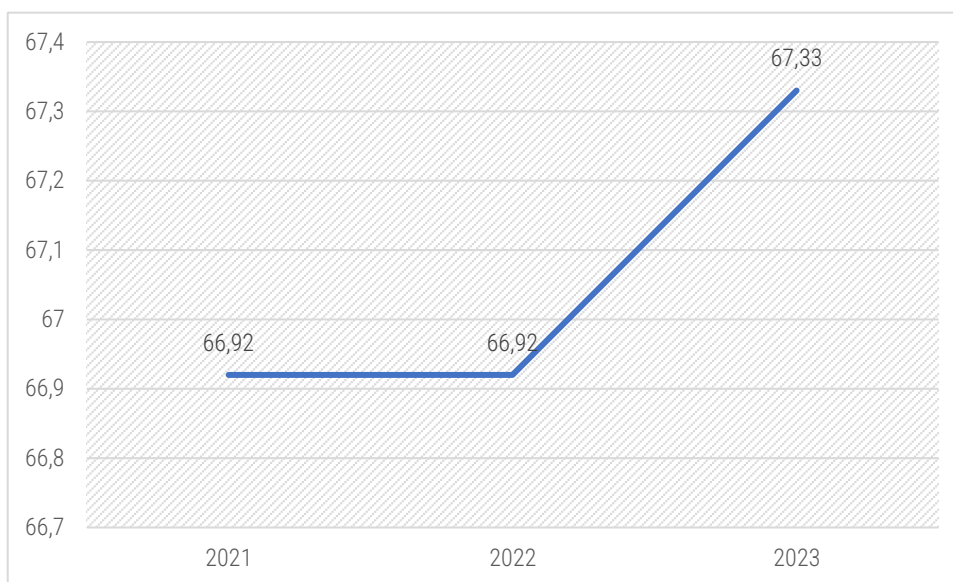
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang disampaikan melalui Surat dari Kemenpan RB Nomor B/408/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah 67,33 atau kategori B tidak memenuhi target BB yang rencanakan pada perjanjian kinerja Tahun 2023. Ketidaktercapaian kinerja ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kinerja melalui perencanaan kinerja berbasis outcome, evaluasi dan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil kinerja. Namun demikian, capaian Nilai AKIP ada peningkatan sebesar 0,41 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 66,92. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain dipengaruhi oleh penguatan proses koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Gambaran mengenai tren kinerja Nilai AKIP dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Gambar 3.23. Tren Kinerja Nilai AKIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bagian Organisasi Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Beberapa masalah yang dihadapi terkait hasil evaluasi AKIP ini yang harus diperbaiki dan diimplementasikan, yaitu:

- a. Belum optimalnya Penerapan manajemen kinerja melalui perencanaan kinerja berbasis outcome, evaluasi dan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil kinerja.
- b. Laporan kinerja pada sebagian besar Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- c. Laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah belum sepenuhnya menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang dimiliki, analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki, serta analisis terkait kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja masih bisa ditingkatkan kualitasnya dengan tidak hanya menjelaskan kendala administratif saja namun juga dengan kendala teknis lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pelaksanaan AKIP, antara lain:

- a. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan dengan mendorong seluruh Perangkat Daerah mengisi capaian kinerja triwulanan;
- c. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP Perangkat Daerah, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi Sistem AKIP.

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai AKIP adalah sebagai berikut.

- a. Penguatan proses koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- b. Menindaklanjuti laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk dipublikasikan ke Website Provinsi Banten dan bisa diakses oleh masyarakat melalui <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id/>
- c. Mengoptimalkan pedoman SAKIP Kota Tangerang Selatan dengan memastikan aspek perencanaan, pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta evaluasi internal telah tersusun secara komprehensif;
- d. Penyusunan dan penyesuaian penetapan target kinerja dengan memperhitungkan capaian pada tahun sebelumnya;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi SAKIP secara berkala;

2. Indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun yang berfungsi sebagai sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai EPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil EPPD Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 adalah sebesar 3.43 dengan kategori Tinggi pada peringkat ke 12 nasional untuk kategori pemerintah daerah kota. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 memperoleh nilai 3,4 terdapat peningkatan 0,03 poin. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang mengakomodir seluruh usulan indikator (*output/outcome*) urusan pemerintahan daerah, dan adanya komitmen pimpinan untuk mendukung Program Nasional dan kegiatan dari kementerian teknis.

3. Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mempertahankan WTP atas pemeriksaan keuangan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Adapun faktor yang menjadi pendorong dari pencapaian target WTP ini adalah penggunaan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin untuk meningkatkan kapasitas Pajak Daerah dalam memahami sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara online, dan transaksi keuangan daerah secara non tunai.

Sebagai upaya ke depan yang akan terus dilaksanakan untuk mempertahankan WTP adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berpedoman pada tahapan penyusunan APBD sebagaimana amanat peraturan perundang undangan.
- b. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Penggunaan aplikasi dalam proses penatausahaan barang milik daerah sesuai regulasi.
- d. Pelaporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- e. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara intensif terutama pada beberapa perangkat daerah yang memiliki alokasi anggaran dan pengelolaan BMD yang besar.

4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

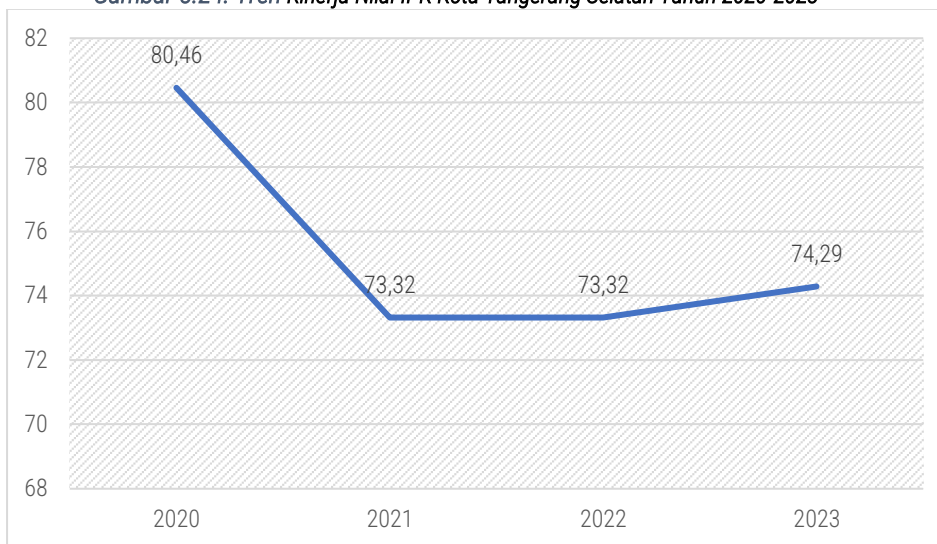
Nilai IPK diukur dari skor skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin Bersih dari Korupsi. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25. Nilai Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Kinerja
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	Bersih dari Korupsi

Nilai IPK Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 74,29 dengan kategori Cukup Bersih dari Korupsi. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dengan nilai 80,46 terdapat penurunan 6,17 poin. Penurunan indeks persepsi korupsi dapat disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berikut gambaran mengenai tren kinerja IPK selama 4 tahun terakhir di Kota Tangerang Selatan dari grafik dibawah ini.

Gambar 3.24. Tren Kinerja Nilai IPK Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Inspektorat Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan IPK di Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan integritas;
- Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik berintegritas tinggi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).

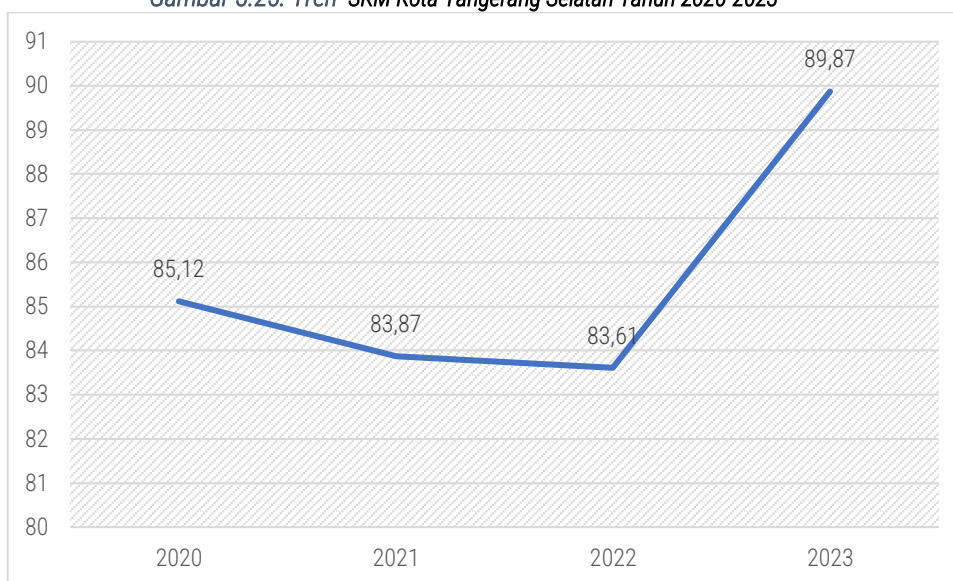
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 125-unit pelayanan publik telah menyampaikan laporannya kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan kategori Sangat Baik di interval 88,31 – 100,00.

Untuk melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara berkesinambungan. Hasil survei digunakan untuk melakukan evaluasi atau perbaikan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait dengan pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren Nilai SKM di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3.25. Tren SKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Bagian Organisasi Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, IKM Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sebesar 85,12. Namun pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami penurunan berturut-turut. Akan tetapi pada tahun 2023, nilai IKM mengalami kenaikan 6,26 poin menjadi 89,87 dengan mutu pelayanan A dan predikat Sangat Baik. Kenaikan IKM tersebut dapat dipengaruhi oleh upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan perluasan sarana pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat secara *online* dan penerapan SOP.

Berdasarkan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah, disampaikan unsur prioritas perbaikan dan Strategi peningkatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26. Unsur Perbaikan Dan Strategi Peningkatan IKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Unsur perbaikan	Faktor penghambat	Strategi Peningkatan
Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana baik berupa Gedung (tata ruang), perlengkapan kantor, layanan umum (misal fasilitas parkir) serta aplikasi (kemudahan, kehandalan dan keamanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan. 2. SDM yang tersedia tidak memiliki kompetensi yang merata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Fisik, Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik pelayanan umum agar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas 2. Perbaikan tata kelola Infrastruktur Umum meliputi jalan akses, dan fasilitas parkir. Perbaikan tata kelola ini akan memudahkan akses masyarakat ke lokasi pelayanan umum dan meningkatkan efisiensi layanan 3. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan umum sehingga pengguna dapat merasakan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi. 4. Menyusun program pelatihan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Program ini mencakup pelatihan teknis, manajerial, dan keterampilan interpersonal
Prosedur dan waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP terkait waktu penyelesaian layanan perlu ditinjau ulang dengan titik berat pada peningkatan efisiensi yang berujung pada percepatan pemberian layanan. 2. Meninjau Kembali SOP terkait simplifikasi dokumen pendukung menjadi less paper atau paper less. 3. Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan belum sepenuhnya terapkan dengan baik. 4. Kurang efektifnya monitoring dan evaluasi yang berdampak pada kurang matangnya strategi perbaikan dan peningkatan pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tinjauan pada SOP terkait waktu penyelesaian layanan dengan fokus pada efisiensi. 2. Mengimplementasikan teknologi dan otomatisasi untuk mempercepat proses, serta berikan pelatihan staf. 3. Melaksanakan monitoring waktu penyelesaian setiap tahap dan identifikasi bottleneck. 4. Mengembangkan sistem pelayanan online untuk mengurangi waktu antrean dan meminimalkan proses manual. 5. Memastikan staf memahami dan menguasai SOP yang baru. 6. Melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kontinu.
Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya akses yang memadai terhadap fasilitas pengaduan. Ini dapat terjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas fasilitas pengaduan dengan kampanye informasi yang luas, termasuk penggunaan media

Unsur perbaikan	Faktor penghambat	Strategi Peningkatan
	<p>karena kurangnya informasi mengenai tempat pengaduan yang tersedia, jarak yang jauh, atau bahkan infrastruktur komunikasi yang kurang memadai</p> <p>2. Fasilitas pengaduan masyarakat kurang mendapat perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai Akibatnya, sistem tersebut mungkin tidak mampu menangani volume pengaduan dengan efisien</p> <p>3. Kurang efektifnya mekanisme umpan balik. Sistem pengaduan yang baik seharusnya juga menyediakan mekanisme umpan balik kepada pelapor. Ketika masyarakat tidak menerima tanggapan atau umpan balik tentang pengaduan mereka, hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk menggunakan fasilitas pengaduan tersebut di masa depan</p>	<p>sosial dan papan pengumuman.</p> <p>2. Memastikan ketersediaan fasilitas pengaduan yang ramah disabilitas.</p> <p>3. Untuk meningkatkan kinerja fasilitas pengaduan, perlu meningkatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai. Ini termasuk peningkatan anggaran, peningkatan kapasitas personel yang menangani pengaduan.</p> <p>4. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme umpan balik, perlu dibangun sistem yang responsif dan transparan. Ini termasuk memberikan konfirmasi penerimaan pengaduan, menetapkan waktu respons yang jelas, dan memberikan umpan balik secara rutin.</p>

Sumber: Bagian Organisasi Kota Tangerang Selatan, diolah, 2024

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan prima, upaya ke depan yang akan dilaksanakan adalah membenahi dan memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, salah satunya melalui integrasi akses pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan dan respon cepat tanggap terhadap aduan permasalahan pelayanan publik. Selain itu, mengoptimalkan penyederhanaan birokrasi pelayanan publik dan transparansi proses pelayanan publik menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti dalam capaian kepuasan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.

Beberapa penghargaan yang didapatkan Kota Tangerang Selatan terkait pencapaian Sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” yaitu:



Penghargaan Pengamanan Penerimaan KPP Pratama Pondok Aren dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan



Pengamanan Penerimaan KPP Pratama Pondok Aren dari KPP Pratama Pondok Aren



Treasury Awards untuk satuan kerja dan pemda terbaik tahun 2022 dari Kanwil DJPb Provinsi Banten



Pengelola Program Imunisasi Kota Tangerang Selatan atas prestasinya sebagai Kabupaten dengan capaian Vaksin PCV Dosis 2 tertinggi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten



Penghargaan Pemenuhan Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tercepat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia



Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja dari Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jendral Perbendaharaan



Satpol PP – Satlinmas Peduli Penanganan Gempa Bumi Cianjur dari Gubernur Jawa Barat



Penghargaan atas Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Pajak Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan



Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 2,95 dan Status Kinerja Sedang Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dari Kementerian Dalam Negeri



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2023 dengan Predikat Baik dari Pemerintah Provinsi Banten



Perolehan Opini WTP Ke-1 dari BPK RI



Penghargaan BKN Award 2023 Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik dari BKN



Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik (Rakornas Kepegawaian 2023) dari BKN



Capaian Pengembangan Kompetensi dari BKN



Penghargaan Daerah Tertibu Ukur dari Kementerian Perdagangan



Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia



Penghargaan Khusus Kategori Ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN Bernilai Sangat Baik dari Apresiasi Mitra Kerja Terbaik Kantor Regional III BKN



Penghargaan Khusus Kategori Ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN Bernilai Sangat Baik dari Kantor Regional III BKN



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2023 dengan Predikat Baik dari Pemerintah Provinsi Banten

KAB/KOTA	Nilai	Predikat
KAB TANGERANG	80,82	SANGAT BAIK
KOTA TANGSEL	77,08	BAIK
KOTA TANGERANG	76,04	BAIK
KAB LEBAK	72,90	BAIK
KAB SERANG	70,39	BAIK
KOTA SERANG	49,31	BAIK
KOTA CILEGON	62,17	BAIK
KAB PANDULANG	60,28	BAIK

Penghargaan Terbaik Kedua Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan II (Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dari BPKAD Provinsi Banten



Penghargaan Daerah Peduli Pelayanan Publik dari Kompas TV



Penyelenggara Pelayanan Perizinan dari Gubernur Banten



Penghargaan Daerah Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Mendapatkan predikat kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dalam rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023 dari Kementerian Hukum Dan HAM



Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Banten



Best Government Officer for Innovation and Creativity on Digital Governance dari Metro TV



Penghargaan Predikat Sistem Merit Sangat Baik dan Predikat Kualitas Pengisian JPT Sangat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara



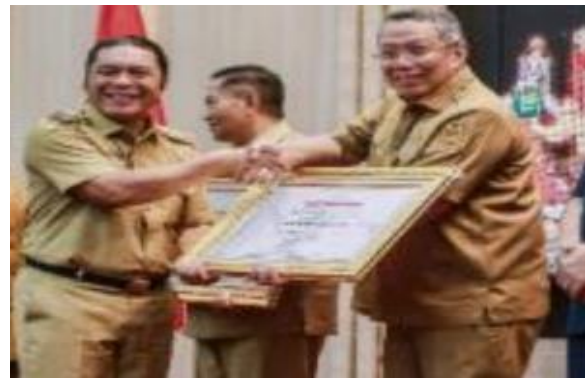
Pelopor REDKAR dari Kemendagri



Sistem Merit dari KASN



Pengisian JPT dari KASN



Kota Peduli HAM 2023 dari KEMENHUKAM



Innovative Government Award (IGA) 2023 dari KEMENDAGRI



Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



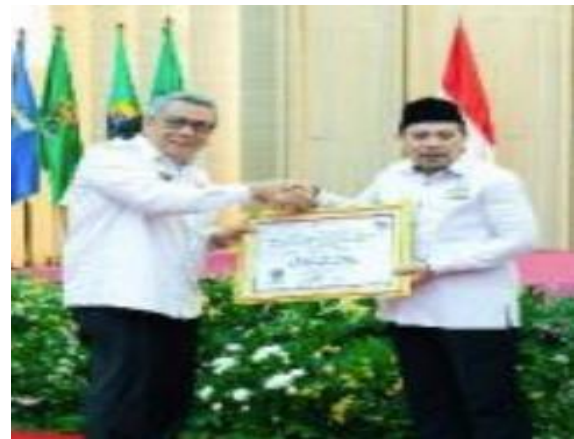
THE HIGHEST SCORE (Indeks BerAKHLAK) Tahun 2023 dari KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA



The Biggest Improvement Indeks BerAKHLAK dari MENPANRB



penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Katagori Utama dari KemenPPPA



Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Predikat Pertama se-Provinsi Banten (Walikota, DISDUKCAPIL dan DINDIKBUD) dari Ombudsman RI



Kinerja Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik "Terbaik" Tahun 2023 dari Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten



. 3 Penghargaan dari Ombudsman RI tentang Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2023.

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan Sasaran, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan dengan total sebesar **Rp4.593.816.184.222,-**, sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp4.410.022.651.215,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **96,00%**.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja dan anggaran Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Capaian	Persen (%)	Efisiensi Anggaran (%)	Efisien Penggunaan Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100\%$	7	8	$9 = (8/7) * 100\%$	10 = (6/9)	11 = 100% - (9)	12 = (10) - 100%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indek Pembangunan Manusia	81,97	83,57	101,95						
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	80,44	80,28	99,80	403.519.792.358	394.572.567.398	97,78	102,06	2,22	2,06
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,93	75,64	103,72	327.480.193.787	307.509.953.666	93,90	110,45	6,10	10,45
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik (70)	Baik (70)	100,00	17.193.497.231	16.247.041.490	94,50	105,83	5,50	5,83
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,70	54,52	101,53	24.545.692.746	24.311.785.272	99,05	102,50	0,95	2,50
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	93,97	93,96	99,99	3.485.729.920	3.391.417.882	97,29	102,77	2,71	2,77
		Indeks Pemberdayaan Gender	73,85	72,67	98,40						
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,75	7,03	122,26						
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	0,63	0,77	122,22	301.861.172.737	294.166.807.521	97,45	125,42	2,55	25,42
		Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,54	0,54	100,00						
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	68,84	69,5	100,96						
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,66	57,93	102,24	943.028.856.437	935.913.143.633	99,25	103,02	0,75	3,02
		Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,37%	99,65%	100,28						

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Capaian	Persen (%)	Efisiensi Anggaran (%)	Efisien Penggunaan Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100\%$	7	8	$9 = (8/7) * 100\%$	10 = (6/9)	11 = 100% - (9)	12 = (10) - 100%
		Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	93,00%	99,35%	106,83						
		Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,31%	4,30%	99,77						
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Aman (66,97)	Aman (66,97)	100,00	37.889.021.315	36.851.810.782	97,26	102,81	2,74	2,81
		Indeks Demokrasi (Predikat)	Baik (>80)	81,00	101,25						
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Rendah (70)	Sedang (79,86)	85,91	253.607.951.172	250.205.978.794	98,66	87,08	1,34	-12,92
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Tinggi (3,75)	Sangat Tinggi (3,81)	101,60						
	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	8,72	14,68	168,35	8.715.990.293	8.434.884.340	96,77	173,96	3,23	73,96
	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,66	7,44	159,66	7.537.944.315	7.082.758.359	93,96	169,92	6,04	69,92
	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	85.289.742	169.838.260	199,13	5.721.384.649	5.427.289.770	94,86	209,92	5,14	109,92
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	87.022.906	109.284.473	125,58						
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	66,00	76,79	116,35						
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB (71)	B (67,33)	94,83	328.219.448.824	301.971.953.664	92,00	103,07	8,00	3,07
		Nilai evaluasi penyelenggaraan	3,80	3,43	90,26						

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Capaian	Persen (%)	Efisiensi Anggaran (%)	Efisien Penggunaan Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi				
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100\%$	7	8	$9 = (8/7) * 100\%$	10 = (6/9)	11 = 100% - (9)	12 = (10) - 100%
		pemerintah daerah									
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00						
		Indeks Persepsi Korupsi	83,00	74,29	89,51						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	89,87	106,99						
A. Jumlah Anggaran Pencapaian Tujuan dan Sasaran						2.662.806.675.784	2.586.087.392.571				
B. Jumlah Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.931.009.508.438	1.823.935.258.644				
Total Realisasi Anggaran (A + B)						4.593.816.184.222	4.410.022.651.215	96,00		4,00	
Rata rata-rata capaian kinerja Sasaran/Outcome					110,68						

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA Per Tanggal 16 Februari 2024), Hasil Analisis Tahun 2024

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran/*outcome* adalah sebesar **110,68%** dengan realisasi anggaran sebesar **96,00%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

3.4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam **kategori Sangat Baik** (*Lebih dari 100%*) adalah pencapaian pada sasaran:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup (tahun), di mana tercapai sebesar 75,64 dari target 72,93. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Meningkatkan daya saing pemuda, dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda di mana tercapai sebesar 54,52 dari target 53,70. Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- c. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan, dengan indikator Rasio konektivitas Kota di mana tercapai sebesar 0,77 dari target 0,63. Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penyelenggaraan Jalan.
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan, dengan indikator.
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai sebesar 57,93 dari target 56,66, Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH).
 - 2) Persentase permukiman layak huni tercapai sebesar 99,65% dari target 99,37%. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Kawasan Permukiman
 - 3) Cakupan Pengelolaan Sampah tercapai sebesar 99,35% dari target 93,00%. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pengelolaan Persampahan.
- e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan Indeks Demokrasi tercapai kategori Aman (66,97) dari target 66,97. Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- f. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif, dengan indikator Nilai sektor ekonomi kreatif tercapai sebesar Rp14,68 triliun dari target Rp8,72 triliun, Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Pengembangan UMKM, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- g. Meningkatnya Investasi, dengan indikator Nilai investasi tahunan tercapai sebesar 7,44 dari target 4,66, Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal.
- h. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, dengan indikator
 - 1) Produktifitas tenaga kerja per total output tercapai sebesar Rp169.838.260 dari target Rp85.289.742, Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 2) Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa tercapai sebesar Rp109.284.473 dari target Rp87.022.906, Hal ini dicapai melalui program-program prioritas yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam **kategori Baik** (76% sampai 100%) adalah pencapaian pada sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan, dengan indikator Indeks Pendidikan tercapai sebesar 80,28 dari target 80,44, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga tercapai kategori Baik (70) dari target 70, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, dengan indikator
 - 1) Indeks Pembangunan Gender tercapai sebesar 93,96 dari target 93,97, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender tercapai sebesar 72,67 dari target 73,85, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 3) Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio) tercapai sebesar 0,54 dari target 0,54, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penyelenggaraan Jalan
 - 4) Ruang Terbuka Hijau Publik tercapai sebesar 4,30% dari target 4,31%, Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan, dengan indikator Indeks Rasa Aman tercapai kategori Aman (66,97) dari target 66. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

- e. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, dengan indikator Indeks resiko bencana tercapai kategori Sedang (79,86) dari target Rendah. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu Program Penanggulangan Bencana, Program Penanganan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- f. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator
 - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercapai Kategori B (67,33) dari target BB
 - 2) Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai sebesar 3,43 dari target 3,80
 - 3) Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah tercapai sebesar WTP dari target WTP
 - 4) Indeks Persepsi Korupsi tercapai sebesar 74,29 dari target 83,00

Capaian terhadap indikator diatas dicapai melalui program prioritas teknis di masing-masing Perangkat Daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun berikutnya, diuraikan berdasarkan Misi pembangunan Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut.

Prioritas pada Misi ke 1:

Prioritas pembangunan dalam rangka pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan akan menjadi agenda utama dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan Indeks pendidikan yang masih harus meningkatkan kemajuan sebesar 1,39 poin lagi hingga tahun 2026 sebesar 81,67 poin, maka pembangunan pendidikan prioritas difokuskan melalui peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang dilakukan melalui upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, begitupun dengan akselerasi angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun akan terus didorong agar supaya capaiannya menjadi 100% antara lain penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan untuk meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah usia 15-18 tahun akan terus dilakukan kolaborasi bersama Provinsi Banten agar mencapai lebih dari 90%.

Sedangkan pada bidang kesehatan akan menjadi agenda utama dalam meningkatkan kinerja derajat kesehatan masyarakat, dengan kenaikan laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH), melalui program-program kesehatan salahsatunya Ngider Sehat yang saat ini sebanyak 54 tim terdiri dari satu orang perawat dan satu orang bidang dalam satu tim. Selain itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga akan mengoptimalkan pengarusutamaan Gender, meningkatkan tren Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta mengoptimalkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Prioritas pada Misi ke 2:

Prioritas pembangunan untuk peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan akan dioptimalkan melalui penyediaan infrastruktur dasar sehingga meningkatkan kualitas jalan kota, jalur pedestrian yang terdiri dari tiga ruas jalan, lalu lintas drainase kota yang terintegrasi, jalan lingkungan hingga mengurai titik kemacetan. Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan untuk interkoneksi antara wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi hingga berdampak pada meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Prioritas pada Misi ke 3:

Dalam upaya menunjang perwujudan sebagai kota layak huni, akan terus mengoptimalkan Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya), Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya), Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas, Keamanan dan keselamatan, Kualitas lingkungan, Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota, serta Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Prioritas pada Misi ke 4:

Prioritas pembangunan dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif menjadi agenda utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui akselerasi peningkatan iklim usaha dan iklim investasi, meningkatkan daya saing produk lokal, mengoptimalkan upaya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Prioritas pada Misi ke 5:

Prioritas pembangunan untuk penguatan kualitas pelayanan publik akan dioptimalkan melalui inovasi tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan reformasi birokrasi yang masih diperlukan berbagai upaya antara lain: (1). mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di lingkup Kecamatan; (2). meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; (3). meningkatkan pengelolaan kearsipan dan keuangan; (4). meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan mudah diakses, (5). mengoptimalkan keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan profesionalitas ASN.

3.5. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp4.593.816.184.222,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp4.410.022.651.215,- atau 96,00% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 7, yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan dengan penyerapan anggaran sebesar 99,25%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 13, yakni Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan serapan anggaran mencapai 92,00%.

Anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Sasaran / Program	Anggaran		Capaian
		Alokasi	Realisasi	
1	2	3	4	5=(5/3)*100%
1	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	403.519.792.358	394.572.567.398	97,78
	Program Pengelolaan Pendidikan	317.269.496.142	311.230.510.403	98,10
	Program Pengembangan Kurikulum	990.808.200	957.077.200	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	82.074.246.536	79.703.723.870	97,11
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.319.331.560	1.173.453.800	88,94
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	987.723.920	921.008.100	93,25
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	878.186.000	586.794.025	66,82
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	327.480.193.787	307.509.953.666	93,90
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	307.484.926.039	288.209.302.220	93,73
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.092.927.403	6.724.657.736	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	161.610.000	160.606.000	99,38
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.149.935.265	11.929.970.400	98,19
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	590.795.080	485.417.310	82,16
3	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	17.193.497.231	16.247.041.490	94,50
	Program Pengendalian Penduduk	367.019.000	364.719.000	99,37
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.989.305.600	4.458.895.700	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.136.571.000	7.037.586.000	98,61
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	123.983.580	123.839.900	99,88
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.001.337.050	994.509.100	99,32
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	158.387.090	155.311.300	98,06
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	203.436.000	200.685.500	
	Program Pemberdayaan Sosial	1.733.969.063	1.635.989.780	94,35

No	Sasaran / Program	Anggaran		Capaian
		Alokasi	Realisasi	
	Program Rehabilitasi Sosial	1.142.151.478	1.022.793.540	89,55
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	337.337.370	252.711.670	74,91
4	Meningkatkan daya saing pemuda	24.545.692.746	24.311.785.272	99,05
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.347.721.746	2.202.924.950	93,83
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.585.644.675	21.509.805.272	99,65
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	612.326.325	599.055.050	97,83
5	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	3.485.729.920	3.391.417.882	97,29
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	663.596.000	660.590.500	99,55
	Program Perlindungan Perempuan	524.444.730	488.351.072	93,12
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.557.441.000	1.545.567.500	99,24
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	24.729.000	21.880.000	88,48
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	86.600.400	84.220.400	97,25
	Program Perlindungan Khusus Anak	628.918.790	590.808.410	93,94
6	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	301.861.172.737	294.166.807.521	97,45
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	89.066.535.287	87.116.343.946	97,81
	Program Penyelenggaraan Jalan	212.794.637.450	207.050.463.575	97,30
7	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	943.028.856.437	935.913.143.633	99,25
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.419.220.481	24.142.278.536	98,87
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	41.967.152.623	41.734.201.729	99,44
	Program Penataan Bangunan Gedung	378.943.208.491	377.216.756.043	99,54
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6.875.388.072	6.874.879.000	99,99
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.845.760.600	1.729.254.600	93,69
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.325.011.360	2.305.538.300	99,16
	Program Pengembangan Perumahan	3.905.115.610	3.603.486.700	92,28
	Program Kawasan Permukiman	40.185.643.950	39.676.885.300	98,73
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	28.928.020.150	28.707.989.593	99,24
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	279.859.468.685	277.501.452.810	99,16
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.739.929.150	2.676.241.240	97,68
	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.585.690.754	1.559.612.910	98,36
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	25.973.367.990	25.642.704.474	98,73
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	313.303.525	304.724.670	97,26
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	239.261.875	221.931.490	92,76
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	247.271.294	240.885.350	97,42

No	Sasaran / Program	Anggaran		Capaian
		Alokasi	Realisasi	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.588.859.556	2.518.091.700	97,27
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	336.852.455	336.461.810	99,88
	Program Pengelolaan Persampahan	99.324.339.346	98.525.815.558	99,20
	Program Penatagunaan Tanah	143.699.840	137.820.240	95,91
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	282.290.630	256.131.580	90,73
8	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	37.889.021.315	36.851.810.782	97,26
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.584.089.630	1.430.291.053	90,29
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.639.026.007	1.457.310.296	88,91
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.617.829.300	2.370.900.158	90,57
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.369.945.280	29.282.118.350	99,70
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	374.563.180	333.075.850	88,92
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.210.941.480	1.124.757.095	92,88
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.092.626.438	853.357.980	78,10
9	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	253.607.951.172	250.205.978.794	98,66
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	150.444.182.678	149.254.753.885	99,21
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	81.543.588.450	80.144.644.034	98,28
	Program Penanggulangan Bencana	2.993.334.329	2.918.174.955	97,49
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	14.719.384.915	14.576.894.520	99,03
	Program Penanganan Bencana	3.907.460.800	3.311.511.400	84,75
10	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	8.715.990.293	8.434.884.340	96,77
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	129.099.400	124.109.700	96,13
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	76.640.970	67.292.300	87,80
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	67.252.150	65.798.960	97,84
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	401.133.960	382.026.330	95,24
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	227.292.356	213.429.130	93,90
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	521.457.350	486.895.560	93,37
	Program Pengembangan UMKM	822.947.090	804.335.700	97,74
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.449.646.120	1.347.322.000	92,94
	Program Pemasaran Pariwisata	980.808.000	933.877.100	95,22
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.132.130	116.340.000	96,84

No	Sasaran / Program	Anggaran		Capaian
		Alokasi	Realisasi	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.360.746.760	2.348.441.260	99,48
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.261.700.657	1.249.895.250	99,06
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	297.133.350	295.121.050	99,32
11	Meningkatnya Investasi	7.537.944.315	7.082.758.359	93,96
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	154.380.980	132.423.000	85,78
	Program Promosi Penanaman Modal	547.961.400	533.063.932	97,28
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.374.792.110	1.278.119.570	92,97
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	281.700.000	277.595.800	98,54
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.417.360	36.530.760	56,71
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	58.637.600	56.892.600	97,02
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.959.363.595	1.821.892.004	92,98
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	311.734.000	310.661.000	99,66
	Program Pengembangan Ekspor	544.557.850	518.395.250	95,20
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	225.915.200	213.856.684	94,66
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	185.500.500	146.452.900	78,95
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.514.025.800	1.452.589.660	95,94
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	14.603.920	14.579.200	99,83
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	300.354.000	289.705.999	96,45
12	Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	5.721.384.649	5.427.289.770	94,86
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	44.805.000	12.170.000	27,16
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.033.199.598	2.021.047.500	99,40
	Program Penempatan Tenaga Kerja	624.569.630	454.940.450	72,84
	Program Hubungan Industrial	559.453.502	542.982.200	97,06
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.381.740.953	1.361.575.800	98,54
	Program Penyuluhan Pertanian	1.077.615.966	1.034.573.820	96,01
13	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	328.219.448.824	301.971.953.664	92,00
	Program Pendaftaran Penduduk	258.306.000	258.256.000	99,98
	Program Pencatatan Sipil	184.100.000	175.404.700	95,28
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	260.000.000	226.102.100	86,96
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	12.032.782.200	11.933.847.000	99,18
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	46.660.276.381	45.846.356.880	98,26
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	401.199.790	398.195.790	99,25
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	565.653.000	553.215.400	97,80
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.779.979.520	1.630.529.590	91,60

No	Sasaran / Program	Anggaran		Capaian
		Alokasi	Realisasi	
	Program Pengelolaan Arsip	564.625.400	480.100.400	85,03
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	15.106.600	15.060.600	99,70
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	52.429.600	49.524.600	94,46
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	31.466.246.896	29.136.113.433	92,59
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.011.419.000	3.788.456.800	94,44
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	42.947.546.776	37.304.474.787	86,86
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.362.501.430	3.116.664.400	92,69
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.834.497.360	1.626.113.570	88,64
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	31.553.876.977	26.194.368.708	83,01
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.878.169.610	4.451.194.988	75,72
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.857.261.962	9.270.228.575	94,04
	Program Kepegawaian Daerah	6.006.977.077	5.413.606.782	90,12
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.142.071.820	5.696.361.166	92,74
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.247.592.970	1.043.820.180	83,67
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.051.619.800	1.015.607.800	96,58
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	600.373.580	535.987.550	89,28
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	66.387.582.094	64.031.103.812	96,45
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.715.248.841	44.503.429.471	89,52
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.372.004.140	3.267.828.582	96,91
		2.662.806.675.784	2.586.087.392.571	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	1.931.009.508.438	1.823.935.258.644	94,46
	Total	4.593.816.184.222	4.410.022.651.215	96,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA Per Tanggal 16 Februari 2024)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran dalam kategori Sangat Baik. Capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat serta semua stakeholder di Kota Tangerang Selatan.

Dari penggunaan anggaran, tingkat efisiensi anggaran mencapai 4,00%, dan capaian kinerja rata-rata sasaran mencapai 110,68%, menunjukkan adanya efisiensi, hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Diharapkan pula pada tahun mendatang kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat semakin baik.



LAMPIRAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BENYAMIN DAVNIE**
Jabatan : **WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tangerang Selatan, 20 November 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

BENYAMIN DAVNIE

Lampiran.

1. VISI dan MISI

a. VISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

"TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN"

b. MISI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

UPAYA UNTUK MENCAPAI VISI, AKAN DICAPAI MELALUI 5 (LIMA) MISI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.
3. Membangun kota yang lestari.
4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif.
5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien.

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

a. TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 - 2026, SEBAGAI BERIKUT:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.
3. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.
4. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah.
5. mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

b. SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 - 2026, SEBAGAI BERIKUT:

BERDASARKAN MASING-MASING TUJUAN, DITETAPKAN SASARAN STRATEGIS UNTUK KUANTIFIKASI LEBIH LANJUT DAN LEBIH TEKNIS AGAR DAPAT DIKELOLA PENCAPAIANNYA SEBAGAI BERIKUT:



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023**

1. Meningkatnya kualitas layanan dan akses Pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan daya saing pemuda.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender.
6. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan.
7. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan.
8. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan.
9. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam.
10. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif.
11. Meningkatnya Investasi.
12. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
13. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023** YAITU *"IMPLEMENTASI TANGSEL UNGGUL, INOVATIF, LAYAK HUNI"*.

d. **TARGET KINERJA DAERAH TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	81,97
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	%	80,44
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	72,93
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Predikat	Baik
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53,70
	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,97

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	pembangunan berbasis gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	73,85
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Poin	5,75
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,63
		Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	Rasio	0,54
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	Poin	68,84
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,66
		Persentase permukiman layak huni (Persen)	%	99,37
		Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	%	93,00
		Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	%	4,31%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Predikat	Aman
		Indeks Demokrasi (Predikat)	Predikat	Baik
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Predikat	Rendah (70)
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Predikat	Tinggi
	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif	(Triliun Rupiah)	8,72
	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	(Triliun Rupiah)	4,66
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	(Rupiah)	85.289.742
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	(Rupiah)	87.022.906
Mewujudkan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	66

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB (71)
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	3,80
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	Poin	83,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,00

Tangerang Selatan, 29 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
1 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL						
				Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		
				Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan		
				1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	317.269.496.142
					1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum	900.808.200
					1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82.074.246.536
				2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan	1.319.331.560
					2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	987.723.920
					2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	878.186.000
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
				1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	307.484.926.039
					1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.092.927.403
					1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	161.610.000
					1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.149.935.265
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	590.795.080
				Meningkatnya kesejahteraan keluarga		
				2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk	367.019.000
					2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.989.305.600
					2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.136.571.000
				2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	123.983.580
					2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.001.337.050
					2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan	158.387.090
					2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan	203.436.000
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial	1.733.969.063
					1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial	1.142.151.478
					1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	337.337.370
				Meningkatkan daya saing pemuda		
				2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.347.721.746
					2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.583.644.675
					2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	612.326.325
				Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender		
				2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	663.596.000
					2.08.03. Program Perlindungan Perempuan	524.444.730
					2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.557.441.000
					2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	24.729.000
					2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	86.600.600
					2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak	628.918.790

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI					
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.				
		Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan				
				2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	89.066.535.287
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan	212.794.637.450
3	MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI					
		Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni				
		Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan				
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.419.220.481
					1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	41.967.152.623
					1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung	378.943.208.491
					1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6.875.388.072
					1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.845.760.600
					1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.325.011.360
				1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan	3.905.115.610
					1.04.03. Program Kawasan Permukiman	40.185.643.950
					1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	28.928.020.150
					1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	279.859.468.685
				2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.739.929.130
					2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.585.690.754
					2.11.04. Program Pengelolaan Keamertagaman Hayati (Kehati)	25.973.367.990
					2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	313.303.525
					2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	239.261.875
					2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	247.271.294
					2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	2.588.859.556
					2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	336.852.455
					2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	99.324.339.346
				2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	2.10.10. Program Penatagunaan Tanah	143.699.840
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	282.290.630
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan				
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.584.089.630

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				7.01. Kecamatan	7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.639.026.007
					8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.617.829.300
					8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.369.945.280
				8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	374.563.180
					8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.210.941.480
					8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.092.626.438
				Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam		
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	150.444.182.678
					1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	81.543.588.450
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	2.993.334.329
					1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	14.719.384.915
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.06. Program Penanganan Bencana	3.907.460.800
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF					
				Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		
				Meningkatnya sektor ekonomi kreatif		
				2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	129.099.400
					2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	76.640.970
					2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	67.252.150
					2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	401.133.960
					2.17.06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	227.292.336
					2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	521.457.350
					2.17.08. Program Pengembangan UMKM	822.947.090
					3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.449.646.120
				3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata	980.808.000
					3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.132.130
					3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.360.746.760
				3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.261.700.657
					3.25.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	297.133.350
				Meningkatnya Investasi		
				2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	154.380.980
					2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal	547.961.400
					2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.374.792.110
					2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	281.700.000
					2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.417.360

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	58.637.600
					3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.959.363.595
					3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	311.734.000
					3.30.05. Program Pengembangan Ekspor	544.557.850
					3.30.06. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	225.915.200
					3.30.07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	185.500.500
				3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.514.025.800
					3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	14.603.920
					3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	300.354.000
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		
				2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	44.805.000
					2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.033.199.598
					2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja	624.569.630
					2.07.05. Program Hubungan Industrial	559.453.502
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.381.740.953
					3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian	1.077.615.966
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN					
				Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		
				2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk	258.306.000
					2.12.03. Program Pencatatan Sipil	184.100.000
					2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	260.000.000
					2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.000.000
				2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	12.032.782.200
					2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	46.660.276.381
				2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	401.199.790
				2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	563.653.000
				2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan	1.779.979.520
				2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02. Program Pengelolaan Arsip	564.625.400
					2.24.05. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	15.106.600
					2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip	52.429.600
				4.01. Sekretariat Daerah	4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31.466.246.896
					4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan	4.011.419.000
				4.02. Sekretariat DPRD	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.947.546.776
				5.01. Perencanaan	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.362.501.430
					5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.834.497.360

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				5.02. Keuangan	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	31.553.876.977
					5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.878.169.610
					5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.857.261.962
				5.03. Kepegawaian	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	6.006.977.077
				5.04. Pendidikan Dan Pelatihan	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.142.071.820
				5.05. Penelitian Dan Pengembangan	5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.247.592.970
				6.01. Inspektorat Daerah	6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.051.619.800
					6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	600.573.580
				7.01. Kecamatan	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66.387.582.094
					7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	49.715.248.841
					7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.372.004.140
				Seluruh Urusan	XX.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.931.009.508.438
Jumlah						4.593.816.184.222

Tangerang Selatan, 20 November 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DARNIE



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
INSPEKTORAT

Komplek Puspemkot Tangerang Selatan, Gedung II Lt. 5, Jalan Raya Maruga No. 1,
Serua - Ciputat

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

Kami telah mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tangerang Selatan, 25 Maret 2024

INSPEKTUR,

Ir. H. ACHMAD ZUBAIR, M.Si, CGCAE
NIP. 19700326 199803 1 006



**PEMERINTAH KOTA
TANGERANG SELATAN**